

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MELAKSANAKAN
BUDAYA PACU JALUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Program Studi Ilmu
Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RONAL YOWANDA PRATAMA

NPM: 207310392

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2026

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ronal Yowanda Pratama
NPM : 207310392
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur**

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 05 Februari 2026

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing,


Dr. Syaprianto, S.Sos., M.IP


Septa Juliana, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ronal Yowanda Pratama
NPM : 207310392
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur**

Naskah skripsi ini benar-benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disajikan sebagai Karya Ilmiah.

Ketua Penguji,

Pekanbaru, 05 Februari 2026

Sekretaris,



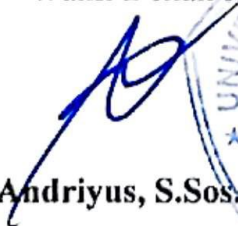
Septa Juliana, S.Sos., M.Si



Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Anggota,



Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si



Dr. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si





KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 029 /UIR-FISIPOL/KPTS/2026

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaldah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
- b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
- 5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan

- Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

- 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: RONAL YOWANDA PRATAMA
N P M	: 207310392
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Septa Juliana, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua Merangkap Penguji |
| 2. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris Merangkap Penguji |
| 3. Dr. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota Merangkap Penguji |
- 2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
 - 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 07 Januari 2026 M
: 18 Rajab 1447 H

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.

NPK 110802413

Tembusan :

- 1. Rektor UIR
- 2. Ka. Biro Keuangan UIR
- 3. Wakil Dekan I FISIPOL UIR
- 4. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email dsipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI (S1) ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Bismillahirrohmannirohim

Menguji Ujian Skripsi Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dengan susunan sebagai berikut :

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Septa Juliana, S.Sos., M.Si	Ketua	
Irwani Garmu, S.Sw., M.Si	Sekretaris	
Dr. Syulwin Rusnadi, S.Sos., M.Si	Anggota	

Hari Kamis Tanggal 08 Januari 2026 Jam 08.00 WIB telah menguji Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan:

IA : RONAL YOWANDA PRATAMA	Tanda Tangan Peserta :
Mahasiswa : 207310392	
L. Sementara : 3,61	
Pembimbing : Septa Juliana, S.Sos., M.Si	

ah Tim Penguji mengadakan Sidang dan menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya Mahasiswa tersebut dinyatakan :

LULUS	MENGULANG
-------	-----------

IGAN NILAI :

atan:

Dekan,

Andriyus, S.Sos., M.Si
Dekan I Bid. Akademik



Pekanbaru, 08 Januari 2026
Ketua Tim Penguji,

Septa Juliana, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ronal Yowanda Pratama
NPM : 207310392
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur**

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua Penguji,



Septa Juliana, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I



Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 05 Februari 2026

Sekretaris,



Irwan Gesmi, S.S.Sos., M.Si

Anggota,



Dr. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Dengan menyebut nama Allah, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW atas karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan judul **“Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur”**. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyatakan keediaan untuk menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Syaprianto., S.Sos, M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pemilihan judul usulan penelitian ini sehingga layak diangkat sebagai suatu karya ilmiah;
3. Ibu Septa Juliana, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini; Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan kepada penulis;
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang

dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama ini kepada penulis;

5. Kepada Ibunda dan Ayah saya yang senantiasa selalu mendoakan saya, serta dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini;
6. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, satu perjuangan, yang ada di Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, serta semangat serta membantu dalam segi moril maupun materil;
7. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia menerima penulis dalam melakukan penelitian di kantor tersebut.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ada di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari setiap orang yang membacanya untuk membuatnya lebih baik. Penulis juga berharap skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan acuan bagi adik-adik tingkat di masa depan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2025 Penulis,

Ronal Yowanda Pratama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II.....	11
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Pemerintahan.....	11
2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	14
3. Konsep Sumber Daya Manusia.....	18
4. Konsep Pemerintah Daerah.....	20
5. Konsep Evaluasi.....	28
6. Konsep Pelaksanaan.....	30
7. Penelitian Terdahulu.....	31
8. Kerangka Pikir.....	33
9. Konsep Operasional.....	34
10. Operasional Variabel.....	36
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
1. Tipe Penelitian.....	38
2. Lokasi Penelitian.....	38
3. Jenis dan Sumber Data.....	39

4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
5. Teknis Analisis Data.....	40
6. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	41
BAB IV.....	42
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	42
A. Historis.....	42
B. Pemerintahan.....	42
C. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	44
BAB V.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Identitas Informan.....	45
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur.....	49
BAB VI.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
A. Buku.....	91
B. Jurnal.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1:	Daftar Juara Pacu Jalur di Tepian Narosa Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2022-2024.....	6
Tabel 2.1:	Penelitian Terdahulu Terkait Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur.....	31
Tabel 2.2:	Operasional Variabel Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur.....	36
Tabel 3.1:	Jumlah Informan Dalam Penelitian.....	38
Tabel 3.2:	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	41
Tabel 4.1:	Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi.	43
Tabel 5.1:	Informan Pada Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur.....	45
Tabel 5.2:	Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur.....	46
Tabel 5.3:	Informan Berdasarkan Pendidikan Pada Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur.....	47
Tabel 5.4:	Informan Berdasarkan Pekerjaan/Jabatan Pada Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pikir.....	34
---------------------------------	----



EVALUASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MELAKSANAKAN
BUDAYA PACU JALUR

ABSTRAK

RONAL YOWANDA PRATAMA

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan Budaya Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Pacu Jalur merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis dan sosial yang tinggi serta berpotensi besar dalam pengembangan pariwisata daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta tokoh masyarakat atau atlet Pacu Jalur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berperan aktif dalam melestarikan dan promosi Pacu Jalur melalui festival tahunan, pembinaan kelompok pelestari budaya, serta kerja sama dengan pihak swasta dan media. Namun, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya yang kompeten, serta koordinasi antar instansi. Evaluasi ini merekomendasikan perlunya kapasitas Lembaga, perencanaan yang lebih matang, serta keterlibatan masyarakat secara luas dalam mendukung keberlanjutan Budaya Pacu Jalur.

Kata Kunci: Evaluasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pacu Jalur, Pelestarian Budaya

EVALUATION OF THE DEPARTEMENT OF CULTURE AND
TOURISM OF THE KUANTAN SINGINGI REGENCY
GOVERNMENT IN IMPLEMENTING THE PACU JALUR
CULTURAL TRADITION

ABSTRACT

RONAL YOWANDA PRATAMA

This study aims to evaluate the performance of the Department of Culture and Tourism in implementing the Pacu Jalur cultural tradition in Kuantan Singingi Regency. Pacu Jalur is a cultural heritage with significant historical and social value, and it holds great potential for the development of local tourism. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving informants from the Department of Culture and Tourism, community leaders, and cultural practitioners. The findings indicate that the Department of Culture and Tourism has actively contributed to the preservation and promotion of Pacu Jalur through annual festivals, guidance for cultural preservation groups, and collaboration with private sectors and media. However, the implementation still faces several challenges, such as limited budget, lack of competent human resources, and coordination issues between institutions. This evaluation recommends enhancing institutional capacity, better planning, and broader community involvement to ensure the sustainability of the Pacu Jalur tradition.

Keywords: *Evaluation, Departement of Culture and Tourism, Pacu Jalur, Cultural Preservation*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia tersusun dari pulau, atas provinsi, kabupaten, dan dihuni ragam suku, bahasa, adat, dan tradisi yang kita kenal sebagai kebudayaan. Kekayaan budaya yang membentang di tanah air ini menjadi saksi bisu bahwasanya negeri ini sarat akan warisan budaya yang beraneka.

Keharmonisan dalam keanekaragaman itu menyingkirkan mitos permusuhan antar kelompok, justru membuka peluang bagi masyarakat untuk menyulam kesatuan dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Koentjaraningrat (2004:9) menyebutkan bahwasanya kebudayaan, dari sudut pandang konseptual, melingkupi gagasan dari pembiasaan dan pembelajaran, juga karyanya. Istilah culture sendiri dari kata colere, bermakna “mengolah atau mengerjakan,” utamanya pertanian, yang kemudian meluas menjadi daya upaya manusia untuk membentuk dan meresapi alam sekitarnya.

Dengan mempertimbangkan pengaruh signifikan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa, bangsa Indonesia senantiasa berupaya menyingkap dan mengembangkan budaya di tiap penjuru daerah, memberi kontribusi pembangunan. Pengembangan budaya lokal ialah sarana pemerintah mewujudkan kemakmuran.

Kebudayaan ialah proses pemanusiaan; perubahan, perkembangan, dan motivasi. Esensi ini bukan semata prosedur dan teknologi, tetapi juga materi atau substansi dari transformasi yang berlangsung.

Provinsi Riau menampung sejumlah kabupaten dengan budaya yang menawan, salah satunya Kabupaten Kuantan Singingi. Di sana terdapat tradisi Pacu Jalur, sebuah pacuan perahu g diisi 40–60 orang, bertanding di Tepian Narosa Sungai Batang Kuantan. Tradisi ini telah dimulai sejak 1905, awalnya untuk menghibur Ratu Belanda, Wilhelmina. Usai kemerdekaan, Pacu Jalur beralih menjadi sarana perayaan Hari Kemerdekaan.

Seperti dikemukakan Suwardi (2007:127), “Kuantan Singingi memiliki satu perlombaan tradisional yang populer, yaitu Pacu Jalur, yang menjadi kebanggaan masyarakat lokal maupun Provinsi Riau. Acara ini awalnya memperingati hari-hari besar umat Islam, termasuk Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Tahun Baru Hijriah. Pada masa penjajahan Belanda, perlombaan dijadikan untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina, biasanya di bulan November. Pasca kemerdekaan, Pacu Jalur difokuskan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.”

Sebelum intervensi Belanda, pengendali adat, khususnya penghulu, menata ranah Rantau Kuantan. Jawara Pacu Jalur berhak mendapati marewa, yakni panji segitiga berornamen warna-warni dengan renda di tepinya, yang dibagi hingga peringkat keempat. Pemberian itu lalu bertransformasi menjadi tonggol marewa bernomor semasa kolonial, dan dewasa ini ganjaran yang paling diagungkan ialah sapi, kerbau, serta trofi bergilir (Hasbullah dkk., 2015:102–106). Sejak 2014, lalu budaya Pacu Jalur sah dicatat dan diputuskan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai warisan takbenda pada Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dalam upaya meneguhkan

keberlanjutan warisan ini, pemerintah memberi dukungan penuh terhadap Festival Pacu Jalur yang digelar setiap tahun, sekaligus menyebarluaskan maknanya pada masyarakat, baik di kancah nasional maupun internasional. Pemenang lomba bahkan berpeluang mengangkat nama Indonesia sebagai atlet nasional dalam kompetisi perahu tingkat internasional.

Pesona Pacu Jalur terletak pada harmoni antara alam, perahu, dan pendayung, yang mampu memikat pengunjung. Festival ini tak sekadar tontonan olahraga; di dalamnya terselip dimensi magis yang dipercayai masyarakat setempat. Wujud Pacu Jalur menganyam unsur olahraga, seni, dan olah bathin menjadi satu kesatuan yang khas. Kepercayaan kuat terhadap peran batin pawing atau dukun, selain kekuatan fisik para pendayung, memengaruhi hasil perlombaan.

Rangkaian acara biasanya dimulai upacara sakral Pawang Jalur. Setiap Jalur memuat banyak elemen unik, seperti patuo, dukun jalur, dan anak jalur. Patuo, sosok dituakan setara manajer, bertugas memilih kayu, menentukan tukang dan tenaga tambahan, mengangkat dukun jalur, menyelenggarakan rapat, serta mengatur kelancaran pekerjaan di hutan hingga penyelesaian semua keperluan.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menghidupkan budaya Pacu Jalur melalui beberapa langkah: pertama, menegaskan pentingnya festival sebagai media pewarisan budaya; kedua, pada 2024 memberikan dana Rp575 juta untuk hadiah lomba; ketiga, menyediakan lokasi promosi melalui Pacu Jalur Expo 2024; keempat, meningkatkan fasilitas penonton agar wisatawan menikmati festival dengan nyaman.

Adapun beberapa cara yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk memeriahkan Budaya Pacu Jalur:

1. Pemerintah menyatakan pentingnya Festival Pacu Jalur ini dalam mewariskan budaya kepada masyarakat luas.
2. Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan dana senilai Rp575 juta untuk Event Budaya Pacu Jalur Tahun 2024, yang digunakan untuk hadiah pemenang.
3. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan tempat untuk promosi, yaitu Pacu Jalur Expo 2024.
4. Untuk meningkatkan fasilitas pendukung atau penonton agar wisatawan yang menyaksikan semakin nyaman Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau mengajak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bekerja sama.

Bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, Pacu Jalur menawarkan objek penelitian yang kaya, karena keterkaitannya dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tradisi ini menyuguhkan beberapa dimensi penelitian:

1. Identitas Budaya

Melalui *Pacu Jalur*, masyarakat meneguhkan identitas dan melestarikan tradisi simbol kebanggaan. Kajian terkait hal ini menyingkap bagaimana pemerintah daerah mendukung pelestarian budaya melalui kebijakan dan pembangunan lokal.

2. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah bertanggung jawab menjaga keberagaman budaya. Penelitian dapat menelusuri bagaimana pemerintah daerah merencanakan,

mendukung, dan mengatur kegiatan budaya, dari pengelolaan SDM hingga pendanaan dan kebijakan pelestarian.

3. Aspek Ekonomi dan Pariwisata

Sebagai daya tarik wisata, *Pacu Jalur* memberi dampak ekonomi lokal. Analisis dapat mengeksplorasi pemanfaatan festival sebagai objek wisata berkelanjutan dan kontribusinya pada ekonomi, serta strategi kebijakan untuk pariwisata budaya.

4. Pembentukan Karakter Masyarakat

Kegiatan budaya dan olahraga ini membangun gotong royong, persatuan, dan kompetitif. Studi menyoroti peran pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan yang menumbuhkan bangsa dan menguatkan sosial.

5. Pembangunan Sosial dan Infrastruktur

Pelaksanaannya menuntut infrastruktur, seperti fasilitas umum. Kajian dapat menelusuri bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan anggaran dan fasilitas untuk mendukung kegiatan budaya ini.

6. Politik Identitas dan Pemerintahan Daerah

Pacu Jalur memperkuat politik masyarakat dan legitimasi pemerintah daerah. Studi mengungkap budaya membangun kebanggaan lokal dan dukungan politik.

7. Aspek Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi warga menjadi inti festival, membuka kesempatan penelitian terkait bagaimana kebijakan pemerintah meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan lokal.

Secara keseluruhan, pacu jalur adalah fenomena sosial budaya yang mencerminkan hubungan antara masyarakat, budaya lokal, dan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian tentang pacu jalur sangat relevan dengan studi ilmu pemerintahan yang berfokus pada kebijakan publik, pengelolaan budaya, pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat.

Pemuka adat dan para penghulu di setiap desa yang memiliki jalur (perahu) di Kabupaten Kuantan Singingi berkolaborasi untuk memilih panitia pelaksana kegiatan Pacu Jalur hingga pembagian hadiah. Setelah Indonesia merdeka, kepanitiaan Pacu Jalur melibatkan Kepala Desa, Camat, dan Bupati, serta tokoh masyarakat dan pemuka adat.

Tabel 1.1: Daftar Juara Pacu Jalur di Tepian Narosa Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Nama Jalur	Asal Jalur
1.	2022	Tuah Keramat Sialang Soko	Setako Raya – Indragiri Hulu
2.	2023	Tuah Keramat Bukit Embun	Gumanti – Indragiri Hulu
3.	2024	Putri Anggun Sibiran Tulang	Banjar Padang – Kuantan Mudik

Sumber: Olahan Data Penulis, 2024

Keberhasilan penyelenggaraan Festival *Pacu Jalur* yang berulang setiap Agustus menandai kecakapan strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi memperkenalkan budaya.

Seiring lahirnya Undang-Undang terkait Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pengelolaan budaya *Pacu Jalur* berpindah ke pemerintah daerah. Dalam Pasal 9, urusan pemerintahan terbagi menjadi absolut, konkuren, dan umum. Pasal 10 menegaskan urusan pemerintahan absolut: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Jika dekonsentrasi, kewenangan ini bisa dialihkan pada instansi vertikal di daerah atau pada gubernur.

Pasal 11 menyinggung urusan pemerintahan konkuren yang menjadi otoritas daerah, terdiri atas urusan wajib yang bersangkutan dengan layanan pokok, urusan wajib yang tak bersangkutan dengan layanan pokok, serta urusan pilihan. Pasal 12 merinci urusan wajib yang berhubungan dengan layanan pokok, melingkupi ranah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman serta ketertiban umum berikut perlindungan masyarakat, juga ranah sosial.

Sementara itu, urusan wajib yang tak bersangkutan dengan layanan pokok mencakup ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan proteksi anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan komunitas dan desa, kendali penduduk serta keluarga berencana, transportasi, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, hingga kearsipan.

Adapun urusan pilihan melingkupi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi. Dari rumpun tersebut, pariwisata ditetapkan sebagai kewajiban langsung pemerintah daerah. Tradisi Pacu Jalur ditahbiskan menjadi agenda wisata tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi, sehingga instansi ini berkewajiban menyusun, mengatur, dan mengembangkan rancangan pelaksanaannya.

Mengacu pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016, struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terbagi atas beberapa unit: Kepala Dinas; Sekretariat yang melingkupi Sub Bagian Umum, Program, dan Keuangan; Bidang Destinasi dengan Seksi Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata, Seksi Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata, serta Seksi Pengelolaan Destinasi; Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif dengan Seksi Pemasaran, Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, serta Sumber Daya; berikut Bidang Kesenian Tradisional, Sejarah, dan Cagar Budaya dengan Seksi Kesenian Tradisional, Sejarah dan Permuseuman, serta Cagar Budaya.

Program pokok Dinas mencakup pemeliharaan dan penghidupan Pesta Budaya Pacu Jalur serta kesenian otentik Kuantan Singingi; peningkatan mutu sumber daya manusia dalam ranah pariwisata; pengelolaan potensi budaya, kesenian, dan alam sebagai destinasi yang atraktif; serta promosi budaya Pacu Jalur pada pelancong dari luar Sumatera maupun mancanegara.

Sarana dan prasarana menjadi penopang utama keberlangsungan festival. Keberadaan fasilitas yang layak menjadi kunci efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam pemenuhan amanah kelembagaan. Namun, kondisi lapangan menyingkap hambatan berupa keterbatasan fasilitas, pemeliharaan yang minim, hingga distribusi yang timpang, sehingga acap memperlambat pencapaian sasaran. Kejayaan festival turut bertumpu pada sinergi dan keterhubungan antar individu maupun kelompok. Kolaborasi yang kokoh berperan meredam kendala yang timbul. Meski demikian, hasil pengamatan menandai masih adanya kekurangan dalam komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan.

Dari pengamatan penulis terhadap festival-festival *Pacu Jalur* sebelumnya, beberapa fenomena menonjol:

1. keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan.
2. kurangnya kolaborasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Kebersihan pengelolaan sampah selama festival.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada judul penelitian, pertanyaan sentral yang muncul dalam studi ini “bagaimanakah Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan budaya pacu jalur?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama studi ini berfokus pada pengungkapan dan pemahaman terkait evaluasi yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di pelaksanaan tradisi *Pacu Jalur*.

D. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis:

- 1) Menjadi sarana pengembangan kemampuan berpikir kritis dan melatih pengaplikasian teori perkuliahan untuk permasalahan serta menelusuri solusi.
- 2) Memberi kontribusi terhadap ilmu, khususnya di ranah pemerintahan

Secara Akademik:

Menjadi referensi literasi bagi peneliti selanjutnya, terutama terkait evaluasi pelaksanaan program atau budaya.

Secara Praktis:

- 1) Menyediakan acuan bagi peneliti lain yang hendak menelaah permasalahan serupa.
- 2) Memberi masukan bagi program evaluasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan mencakup ragam kekuasaan, kebijakan, hingga layanan: organisasi formal juga sebuah dinamika prinsip yang menautkan masyarakat. Dalam kerangka ini, institusi pemerintahan memainkan peran krusial dalam mencipta kondisi yang memungkinkan kesejahteraan merata. Pemerintahan menangani persoalan publik, mulai dari pengambilan keputusan, penegakan hukum, penyediaan layanan, hingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsep pemerintahan memadukan kompleksitas, ragam, dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan zaman.

Pemerintahan mengatur hubungan antara negara dan rakyat, serta membagi kekuasaan di antara lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam fungsinya, pemerintahan menyediakan layanan publik, menegakkan keadilan, dan mendorong partisipasi masyarakat di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi. KBBI mendefinisikan pemerintahan ialah proses kelola negara, mencakup kegiatan menjaga kesejahteraan bangsa.

Sri Sutjiatmi (2010:11) menekankan bahwasanya tanpa pemimpin pemerintahan, kebebasan masyarakat akan berpotensi anarkhis, karena bebas aturan. Level paling atas pengaturan ialah pemerintahan negara atau “penjaga malam”. Kekuasaan yang awalnya diarahkan menciptakan ketertiban kadang disalahgunakan sehingga kesejahteraan hanya dinikmati segelintir orang.

Akibatnya, negara dapat mengeksploitasi tenaga rakyat, sementara pembangkang dianggap separatis atau pengacau keamanan, kecuali mereka berhasil merebut kekuasaan melalui revolusi.

Sebagaimana Muhadam Labolo (2015:301-302), istilah “pemerintahan” mengingatkan aktivitas memerintah, baik individu, kelompok, badan, maupun sistem. Objeknya berupa urusan, rangkaian aksi, atau proses yang saling terkait. Pemerintahan dapat muncul sebagai proses alamiah, sosial, ekonomi, politik, hukum, maupun teknis, dan terlaksana melalui rangkaian kegiatan yang saling berhubungan. Dengan demikian, “memerintah” berkonotasi sebagai proses pengendalian atau proses pemerintahan itu sendiri.

Lebih lanjut, Labolo (2007:85-86) memandang kehidupan sosial sebagai sistem, yakni keseluruhan dari unsur-unsur yang saling berhubungan, ditandai manusia yang hidup bersama, berinteraksi dalam jangka waktu lama, menyadari kesatuan mereka, dan membentuk sistem kehidupan kolektif. Dalam konteks budaya, ia menekankan bahwasanya kebudayaan ialah keseluruhan gagasan, tindakan, dan karya manusia yang dijadikan pegangan melalui proses pembelajaran. Peradaban (civilization) merujuk pada kebudayaan halus dan maju, melingkupi seni, ilmu, adat, organisasi, hingga teknologi.

Baharuddin Thahir (2019) menambahkan bahwasanya pemerintah tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga dalam dimensi perasaan masyarakat. Kehadiran ini terasa ketika seseorang dapat bergerak dengan aman tanpa rasa waswas di malam hari, sedangkan ketiadaan pemerintah terlihat saat kejahatan dapat terjadi meski banyak kantor pemerintah berdiri.

Mendra Wijaya (2024:12) menyatakan bahwasanya ilmu pemerintahan bertujuan memberi pemahaman mendalam terkait sistem pemerintahan, merumuskan kebijakan efektif, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Analisis mencakup struktur kelembagaan, proses politik, interaksi antar-elemen politik, mekanisme kontrol kekuasaan, serta hubungan pemerintah dengan masyarakat. Sebagaimana Wijaya (2018:6-8), konsep Good Governance memiliki definisi yang berbeda-beda tetapi berpijak pada pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Definisi dari berbagai lembaga internasional dan nasional antara lain:

1. UNDP menekankan otoritas politik, ekonomi, dan administratif;
2. World Bank menyoroti pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial;
3. LAN menekankan penyediaan layanan publik;
4. Caroline G. Hernandez menilai kualitas pemerintahan dari proses pengambilan keputusan.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2001 terkait Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwasanya pemerintahan mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan diterima rakyat.

Urusan pemerintahan pusat dibagi menjadi tiga:

1. Urusan Pemerintahan Absolut:

Urusan ini hanya berposisi di bawah kendali pemerintah pusat. Pemerintah daerah. Seluruh kebijakan urusan absolut menjadi tanggung jawab pusat.

2. Urusan konkuren

Bidang ini menjadi ranah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua pihak mengatur dan melaksanakan urusan, dengan peran terbagi agar penyelenggaraan berjalan harmonis.

3. Urusan pemerintahan umum

Urusan ini berkaitan dengan pelaksanaan administratif, tanpa terhubung sektor lain. Ranah ini melingkupi seluruh aspek penyelenggaraan dengan fokus pengelolaan aparatur menyeluruh.

2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sebagaimana Inu Kencana Syafii (2013:54), asas ialah pijakan, pedoman, atau kebenaran, titik acuan dalam pegangan prinsip. Dalam konteks ilmu pemerintahan, asas berperan sebagai fondasi dari sistem pemerintahan suatu negara, termasuk ideologi dan konstitusi.

Menyingkap asas pemerintahan memerlukan pemahaman terhadap prinsip, pikiran, tujuan, struktur, kekuatan, dan pembentukan. Sebab ilmu pemerintahan bersifat kontekstual, pengkajian asas tidak dilangsungkan secara universal, melainkan diarahkan pada pemerintahan negara tertentu.

Setiap negara menorehkan sistem pemerintahan yang berbeda, berkembang selaras dengan situasi dan kondisi setempat. Perubahan waktu dan ruang kerap menorehkan pergeseran sistem, misalnya perbedaan mencolok antara Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia, atau Republik Perancis yang berganti sistem hingga lima kali, dari Republik Pertama hingga Republik Kelima. Transformasi bisa juga melibatkan pergantian elit, seperti dari Kerajaan Singosari ke Majapahit, atau dari

Iran zaman Syah ke Republik Islam Iran. Bahkan kerajaan Inggris memiliki ciri pemerintahan berbeda dibanding jajahannya.

Ndraha (2003:681) menegaskan bahwasanya prinsip pemerintahan ialah pola perilaku normatif dari pemerintah yang berakar pada nilai-nilai sistemik, diterapkan secara objektif untuk meningkatkan efektivitas interaksi antara pemerintah dan pihak terkait.

Haudi (2021:6-10) merinci asas pemerintahan:

1. Asas memandang jauh ke depan

Pemerintahan harus memiliki visi yang jauh ke depan (*foresight*), memerlukan perencanaan strategis yang matang, mempertimbangkan waktu, masa jabatan, kesempatan, dan generasi yang akan datang.

2. Asas berpikir panjang

Keputusan pemerintah perlu dipertimbangkan dengan matang, menakar risiko secara rasional dan objektif, agar aturan dan kebijakan yang dihasilkan menghasilkan dampak yang konstruktif.

3. Asas belajar dari sejarah

Pemerintahan berjalan sebagai rangkaian proses sejarah, di mana setiap peristiwa memiliki sebab-akibat, aktor, dan dampak yang jelas. Sejarah berperan sebagai cermin, memberi pelajaran bagi pemerintah agar setiap keputusan tidak diulang tanpa pertimbangan matang.

4. Asas kepastian dan perubahan

Hukum positif menjadi bingkai bagi perubahan sosial, sementara perubahan itu sendiri tak terelakkan. Pemerintah harus menyiapkan

manajemen perubahan agar setiap transformasi membawa perbaikan dan keseimbangan sosial.

5. Asas keserasian tujuan, dengan motif, cara, dan alat

Kebijakan lahir dari motif, dijalankan melalui cara, berujung pada output berupa kebijakan atau hasil pelaksanaan pemerintahan. Keselarasan antara tujuan, motif, proses, dan sarana menjadi inti keberhasilan kebijakan.

6. Asas profesionalisme

Profesional menuntut ketekunan, penguasaan tugas, dan pelaksanaan yang benar. Dalam manajemen sumber daya manusia dan administrasi, profesionalisme memastikan pekerjaan tuntas dengan mutu tinggi.

7. Asas tanggung jawab

Pemerintah dan masyarakat yang diperintah menanggung risiko dari setiap tindakan dan keputusan. Tanggung jawab ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsekuensi dari kebijakan yang dijalankan.

8. Asas kepatuhan

Ketaatan terhadap aturan dan hukum membentuk fondasi tertib, adil, dan konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjamin keberlanjutan dan legitimasi tindakan pemerintah.

9. Asas kebersamaan

Setiap individu mendapat perlakuan adil di hadapan hukum dan layanan publik. Hak-hak manusia dijaga, dihormati, dan dilayani secara prima, menciptakan rasa keadilan sosial.

10. Asas *good governance*

Pemerintahan modern menuntut transparansi, keadilan, pelayanan prima, kepastian hukum, efisiensi, dan efektivitas. Sinergi antar stakeholder pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci agar asas ini terselenggara.

11. Asas persatuan dalam perbedaan

Keberagaman Indonesia, mulai dari suku, agama, budaya, hingga bahasa, dijalin melalui asas ini. *Bhineka Tunggal Ika* menegaskan bahwasanya perbedaan menjadi rahsia ilahi dalam persatuan bangsa.

Aristoteles menekankan bahwasanya penguasa sejati ialah penegak hukum dan keseimbangan, sehingga moralitas menjadi inti keahlian memimpin, menetapkan aturan, dan merumuskan undang-undang. Tanggung jawab warga negara menjadi penting, karena keadilan menjamin kebahagiaan bersama.

Prinsip fundamental yang diterapkan di berbagai negara mencakup supremasi hukum, kesetaraan, dan penegakannya. Konsep negara hukum menuntut stabilitas, diadaptasi sesuai kesejahteraan masyarakat, ideologi, dan filosofi. Negara berkewajiban melayani dengan baik rakyatnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah menetapkan bahwasanya pelaksanaan pemerintahan daerah berlangsung melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan.

3. Konsep Sumber Daya Manusia

Sebagaimana Hasibuan, manusia menampung kapabilitas antara kekuatan dan ketajaman akal budi. Ia bukan sekadar pelaku, melainkan juga bentuk interaksi yang terjalin dengan lingkungannya dan diwarisi dari keturunan. Prestasi yang dicapai muncul dari dorongan batin untuk memenuhi kepuasan pribadi, sekaligus menegaskan eksistensi dirinya dalam dunia kerja.

Daniel Adi Seya Rahardjo (2022:3) menekankan bahwasanya sumber daya manusia menempati posisi sentral dalam keberhasilan setiap organisasi. Sebab, mayoritas permasalahan yang muncul dalam tata kelola organisasi bersumber dari dimensi manusiawi dan sosial, bukan semata dari aspek fisik, teknis, atau ekonomi. Kelalaian dalam menata manusia membawa kerugian yang luas bagi bangsa, perusahaan, maupun individu. Sebagaimana Oliver Sheldon ungkapkan, tidak ada industri yang dapat menempuh efisiensi sejati jika inti dari prosesnya tidak dipahami. Organisasi bukanlah sekadar kumpulan mesin dan prosedur teknis, melainkan mozaik manusia yang bergerak, berinteraksi, dan memberi nyawa pada seluruh sistem.

Sementara itu, Erbin Chandra (2021:2) mengatakan manusia adalah aset yang memiliki akal sehat, hati nurani, emosional, yang mampu memahami satu sama lain, dan di sini juga letaknya berbagai ide-ide brilian yang mampu menciptakan perubahan yang luar biasa. Mereka juga sebagai pihak yang memiliki kemampuan dalam membaca berbagai fenomena, peluang, ancaman, penggerak dari manusia lain, dan sang pengambil keputusan.

Oleh karena itu, setiap perusahaan tidak dapat menyepelekan asset manusia di dalamnya. Mereka harus dikelola dengan baik, diberdayakan, dididik, dikembangkan kemampuannya sehingga mampu menciptakan produktivitas ke dalam level yang lebih tinggi di dalam sebuah organisasi yang ujung-ujungnya tetap berdampak terhadap keuntungan organisasi tersebut.

Irawan (2024:8), pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek kritis dalam memastikan pertumbuhan dan kelangsungan organisasi. Komponen-komponen utama dalam pengembangan SDM mencakup pelatihan dan pengembangan, Pendidikan dan pembelajaran, manajemen kinerja, serta pengembangan karir. Setiap komponen ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas, keterampilan, dan motivasi individu dalam organisasi, sekaligus meningkatkan efektivitas keseluruhan dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja yang dinamis.

Irma Yuliani (2023:96) menegaskan secara umum tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan (Amstrong, 1997:507). Tujuan tersebut di atas dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Selain itu perlu pula diperhatikan bahwa dalam Upaya pengembangan sumber daya manusia ini, kinerja individual dan kelompok adalah subjek untuk peningkatan yang berkelanjutan dan bahwa orang-orang dalam organisasi dikembangkan dalam cara yang sesuai untuk memaksimalkan potensi serta promosi mereka.

Zulkifli Rusby (2017:86), pentingnya pengembangan sumber daya manusia yaitu setiap unit kerja lebih mengetahui kebutuhan pengembangan yang bersifat pengetahuan dan keterampilan teknis pegawai yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, bagian kepegawaian dalam hal ini pengembangan tersebut berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan dan berhubungan dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknis dari setiap unit kerja, bagian kepegawaian dapat melakukan perencanaan pengembangan karier pegawai agar organisasi memiliki pegawai yang siap pada saat dibutuhkan untuk posisi atau jabatan baru.

4. Konsep Pemerintah Daerah

Akar pemerintahan daerah yang kita kenal kini menjejak jauh ke Eropa abad ke-11 hingga ke-12. Istilah-istilah yang masih tersisa menyimpan gema masa

lampau, berasal dari Yunani dan Latin. Kata *koinotes* atau komunitas, serta *demos* atau rakyat, menandai interaksi warga dalam kehidupan kolektif Yunani, sementara *municipality* lahir dari *municipium* Romawi. Kata *city* bersumber dari *civitas*, turunan dari *civis* yang berarti penduduk, dan *country* berasal dari *comitates*, dengan *comes* sebagai kantor pejabat kerajaan.

Dalam praktiknya, pemerintahan daerah, atau pemerintahan lokal seperti dikenal di dunia Barat, berjalan di atas fondasi asas, sistem, dan prinsip yang menuntun penyelenggaraan daerah, otonomi, serta tujuan pemerintah itu sendiri. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini bukan sekadar keharusan administratif, melainkan nadi vital bagi para penyelenggara yang ingin menegakkan pemerintahan yang cermat dan beradab. Setiap kebijakan, perencanaan, dan pengendalian menitikberatkan asas penyelenggaraan yang telah lama tersusun.

Rahyunir Rauf (2018:283) menegaskan, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah, unsur pemerintahan daerah tersusun atas kepala daerah dan perangkatnya. Kepala daerah memikul nama Gubernur bagi provinsi, Bupati untuk kabupaten, juga Walikota bagi kota. Sementara perangkatnya berperan sebagai tangan kanan yang mendukung kepala daerah dalam menjalankan amanah dan kewajibannya.

Arnold Ferdinand Bura (2023:161) menekankan kedudukan kepala daerah sebagai sosok sentral dalam struktur pemerintahan lokal. Ia bukan sekadar pemimpin administratif, tetapi juga representasi kehendak rakyat yang terjalin melalui koordinasi dan representasi. Kepala daerah provinsi, Gubernur, tidak hanya bertanggung jawab pada DPRD, tetapi juga menjadi wakil pemerintah pusat. Bupati

dan Walikota mengemban tanggung jawab pada DPRD setempat, sekaligus mengharmoniskan aspirasi lokal dengan kebijakan nasional.

Tamaulina Br. Semniring (2023:17-18) menurut Oppenheim dalam bukunya "*Het Nederlandsch Gementerecht*," disebutkan ciri-ciri pemerintahan daerah meliputi:

1. Lingkungan atau wilayah geografisnya memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan dengan negaranya.
2. Memiliki jumlah penduduk yang mencukupi.
3. Terdapat kepentingan-kepentingan yang sulit dipisahkan dari yang menjadi tanggung jawab pemerintah, namun berkaitan dengan lingkungan tersebut, sehingga warga berusaha untuk mengurusnya sendiri.
4. Terdapat lembaga yang memfasilitasi dalam mengelola kepentingan-kepentingan ini.
5. Memiliki kemampuan untuk memasok sumber daya yang diperlukan.

Andries Lionardo (2011:89-91) mencatat, pelaksanaan pemerintahan daerah mengalami metamorfosis, ditandai lahirnya Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004 mengatur otonomi dan keuangan daerah. Desentralisasi ini memberi ruang menata kesejahteraan masyarakat, dengan pengecualian bidang politik luar negeri, pertahanan, hukum, moneter, fiskal, dan agama, juga mencakup alokasi dana dari pusat untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan lokal.

Ulfa (2024:171) mengungkapkan untuk menegakkan kinerja yang gemilang, pemerintah daerah dimungkinkan menempuh jalan inovasi. Inovasi ini mencakup

segala bentuk pembaruan dan penyempurnaan dalam tata kelola pemerintahan lokal, menjadikannya bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi napas baru bagi dinamika birokrasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, pada Pasal 388, bahwasanya pemerintah pusat mengevaluasi keberhasilan pemerintah daerah. Penghargaan disiapkan sebagai pengakuan bagi daerah-daerah yang berhasil menorehkan praktik inovatif. Sebagai kelanjutan dari landasan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 hadir sebagai pedoman operasional, membimbing pemerintah daerah dalam menapaki praktik inovatif demi penyelenggaraan responsif, adaptif, dan berdaya guna.

Hakikat desentralisasi ialah mewariskan tanggung jawab pada Pemerintahan Daerah agar berlandaskan tata kelola baik (*Good Governance*). Dalam kerangka Otonomi Daerah, delegasi kewenangan dan tanggung jawab harus berjalan efektif, disertai tersedianya keuangan memadai. Pemerintah menjalankan fungsi melalui Instrumen Kebijakan Fiskal, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran bukan sekadar angka di lembar anggaran, melainkan pedoman bagi pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan tolok ukur evaluasi kinerja seluruh unit kerja.

Salah satu ranah yang menuntut kehati-hatian ialah pengelolaan anggaran daerah, karena APBD ialah instrumen utama kebijakan. Sebagai penopang strategi pembangunan, anggaran daerah menempati posisi vital dalam memperkuat kapabilitas dan efektivitas pemerintahan lokal. Anggaran bukan hanya alat untuk menetapkan pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga sebagai otorisasi dan panduan pengelolaan masa depan. karenanya, DPRD dan Pemerintah Daerah perlu menapaki

proses perencanaan konkret agar APBD merefleksikan kenyataan, menyesuaikan potensi, preferensi, dan pola pembangunan. Hanya dengan demikian, pengeluaran bisa dioptimalkan dan sasaran pembangunan berupa pelayanan juga kesejahteraan tercapai dengan nyata.

Menilik hakikatnya, pemerintahan memikul tiga fungsi pokok yang saling melengkapi. Fungsi alokasi menapaki jalan pengelolaan sumber-sumber ekonomi, membagi dana dan barang atau jasa bagi pelayanan masyarakat agar kebutuhan nyata tersentuh. Fungsi distribusi menegakkan keadilan sosial melalui kebijakan pemerataan, pendapatan, dan kekayaan, bertujuan mereduksi jurang dalam masyarakat. Stabilisasi menjaga ritme kehidupan negara, melingkupi pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta moneter, sehingga tercipta kesempatan kerja, kestabilan harga, dan ekonomi.

Secara umum, fungsi distribusi dan stabilisasi efektif dijalankan Pemerintah Pusat, sementara fungsi alokasi diserahkan pada Pemerintah Daerah yang akrab dengan kondisi masyarakat dan pelayanan lokal. Namun, otonomi daerah menimbulkan tantangan dalam pengeluaran di tingkat daerah. Pemerintah Daerah wajib menguasai seni perencanaan, program, dan anggaran secara mandiri. Kekosongan pengalaman atau ketidaksiapan dapat menimbulkan kesalahan dalam prioritas dan penahanan proyek, menghalangi arah pembangunan yang seharusnya menyentuh kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Dalam perjalanan melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah, desentralisasi hadir sebagai wujud otonomi luas juga penuh tanggungjawab, menyesuaikan irama

kebutuhan masyarakat lokal. Otonomi yang bertanggung jawab bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi ialah janji yang selaras dengan tujuan pemberian otonomi, yakni memberdayakan daerah dan menyalakan kesejahteraan rakyat, inti dari cita-cita nasional. Selaras dengan prinsip ini, penyelenggaraan otonomi daerah senantiasa menempatkan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bintang penuntun, meresapi setiap aspirasi yang tumbuh, dan menenun keserasian untuk menguatkan kesejahteraan serta mencegah ketimpangan.

Deddy Supriady Bratakusuma (2001:40-41) menekankan bahwasanya penguatan desentralisasi menuntut pemerintah pusat menahan porsinya pada penetapan norma, standar, dan prosedur. Kewenangan pelaksanaan menyentuh aspek:

1. Menjaga identitas dan integritas bangsa agar tetap utuh seperti nadi yang berdetak tanpa henti.
2. Menjamin kualitas pelayanan publik yang setara bagi setiap warga, tanpa diskriminasi, sebagai wujud keadilan sosial.
3. Memastikan efisiensi layanan publik berskala nasional, agar setiap tindakan tidak sia-sia dan setiap sumber daya terjalin harmonis.
4. Menjaga keselamatan fisik dan nonfisik warga, sebagai pagar pelindung yang tak terlihat namun kokoh.
5. Menyediakan dan mengawal teknologi langka atau berisiko, beserta individu ahli dan terpilih, demi kebutuhan strategis bangsa, mulai dari tenaga nuklir hingga peluncuran satelit dan penerbangan canggih.

6. Menjamin supremasi hukum nasional, sehingga keadilan bukan sekadar kata, tetapi denyut yang nyata.
7. Membina stabilitas ekonomi untuk menyalakan kemakmuran rakyat, mencipta fondasi bagi kehidupan yang layak dan sejahtera.

Sebagaimana Eko Prasetyo (2003:13-15) Eko Prasetyo menegaskan bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang murni dan bijak (*local good governance*) menjadi syarat yang tak tergoyahkan bagi terselenggaranya pembangunan berkelanjutan berpijak pada rakyat sebagai pusat gravitasi. Hanya pemerintahan berintegritas mampu menyalurkan daya dan menata persoalan dengan efisiensi, menanggapi kebutuhan kritis warga, serta menapaki jalan demokrasi melalui partisipasi publik, akuntabilitas, dan transparansi yang nyata.

Pemerintahan yang sejati juga menjadi penyeimbang ketika pasar gagal menyalurkan kebutuhan, menyediakan barang publik yang tak terpenuhi mekanisme ekonomi, serta mendistribusikan pendapatan melalui pajak. Ia membuka pintu kesempatan setara untuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sambil meringankan beban hidup dan risiko kerja melalui dana pensiun dan asuransi pekerja. Lebih jauh, pemerintah yang arif menanamkan nilai moral, spiritual, dan budaya sebagai benih bagi tatanan masyarakat yang lestari.

Suatu pemerintahan dikatakan bersih dan bijaksana apabila menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), antara lain:

- 1) Asas kecermatan formal, mempersiapkan dan mengeluarkan keputusan secara cermat, jujur, dan penuh pertimbangan atas semua fakta dan kepentingan pihak terkait;
- 2) Asas fairplay, keputusan tidak menghalangi pihak berkepentingan untuk mendapati hasil yang adil dan menguntungkan;
- 3) Asas pertimbangan, keputusan pejabat publik harus disokong fakta yang benar dan relevan, bersifat kongkret, dan selaras dengan kebiasaan yang diketahui publik;
- 4) Asas kepastian hukum formal, hukum formal harus jelas, tegas, dan tidak samar-samar;
- 5) Asas kepastian hukum material, keputusan yang membebani tidak berlaku surut, sehingga menegaskan rasa keadilan;
- 6) Asas kepercayaan, keputusan yang menimbulkan harapan melalui janji atau rencana tidak boleh dikhianati; kepercayaan terbangun melalui konsistensi kebijakan dalam waktu yang cukup lama;
- 7) Asas persamaan, kondisi yang sama diperlakukan sama, dengan relevansi terhadap kepentingan yang hendak dijaga;
- 8) Asas kecermatan material, kerugian yang ditimbulkan tidak melampaui manfaat yang diperoleh dari keputusan pejabat publik; dan
- 9) Asas keseimbangan, sanksi yang diterapkan harus proporsional dengan bobot pelanggaran yang dilangsungkan.

Terkait fungsi pokok pemerintahan, unsur-unsur yang telah diuraikan tetap relevan dalam ranah pemerintahan daerah, karena pemerintah daerah memikul

tanggung jawab atas penataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berada dalam cakupan yurisdiksinya.

Bisa dikemukakan bahwasanya gagasan terkait pemerintahan daerah melingkupi organisasi, lembaga, dan institusi pemerintahan, disertai fungsi-fungsi dan aktivitasnya, serta wilayah-wilayah administratif yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Konsep Evaluasi

Secara harfiah, evaluasi meniti jejak kata dari bahasa Inggris *evaluation*, bermakna penilaian. Evaluasi dapat pula dimaknai sebagai proses menyajikan informasi untuk merumuskan keputusan. Ia ialah penilaian data melalui asesmen. Arief Aulia Rahman (2019:4-5), menegaskan bahwasanya evaluasi ialah pemberian nilai kualitas, sekaligus proses sistematis merencanakan, mendapati, dan menyediakan informasi guna meramu keputusan. Evaluasi menjadi alat ukur menyingkap sejauh mana tujuan pengajaran atau kebijakan telah tercapai. Kriteria evaluasi dijadikan indikator untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. William N. Dunn (2003) mengungkap enam kriteria utama evaluasi kebijakan:

1. Efektivitas (*effectiveness*) menyentuh pertanyaan apakah suatu alternatif berhasil menorehkan hasil dituju atau sasaran. Keberhasilan ini kerap diukur dari produk, layanan, atau nilai moneter yang dihasilkan. Efektivitas menekankan kesesuaian antara niat kebijakan dan hasil nyata yang tampak di lapangan;

2. Efisiensi (*efficiency*) menyinggung jumlah usaha untuk meraih efektivitas. Dalam kacamata rasionalitas ekonomi, efisiensi menguraikan hubungan antara hasil yang diperoleh dan sumber daya yang dikerahkan, biasanya diukur melalui ongkos moneter. efisiensi menyoroti optimalisasi sumber daya agar output maksimal tercapai tanpa pemborosan;
3. Kecukupan (*adequacy*) menyingkap sejauh mana efektivitas memenuhi kebutuhan atau kesempatan, menekankan hubungan alternatif kebijakan dengan hasil;
4. Pemerataan (*equality*) yaitu sejauh mana manfaat dan beban dari suatu kebijakan public didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat, terutama antara kelompok yang kuat dan lemah, kaya dan miskin, mayoritas dan minoritas;
5. Responsivitas (*responsiveness*) menilai kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai, karena semua ukuran lain, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan, menjadi sia-sia jika kebutuhan aktual kelompok yang seharusnya diuntungkan tidak terpenuhi, responsivitas menekankan hubungan langsung antara kebijakan dan aspirasi nyata masyarakat;

6. Ketepatan (*appropriateness*) menyingkap hubungan antara kebijakan dan rasionalitas substantif, di mana ketepatan tidak hanya menilai satu aspek tetapi menimbang dua kriteria atau lebih secara serentak. Ketepatan mencerminkan nilai program serta asumsi, ketepatan memastikan kebijakan bukan sekadar formal, melainkan relevan dan selaras dengan kondisi nyata serta tujuan strategis.

Secara keseluruhan, evaluasi program publik tidak hanya menyoroti keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang dirumuskan, tetapi juga membuka jendela untuk memahami pandangan kelompok sasaran, sekaligus menyediakan strategi perbaikan bagi program atau kebijakan yang akan datang. Evaluasi menjadi alat refleksi dan penggerak inovasi bagi pembuat kebijakan.

6. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah wujud nyata dari rencana yang telah disusun dengan seksama dan rinci, sebuah tindakan yang menuntun gagasan menuju kenyataan. Implementasi muncul setelah perencanaan dipandang matang dan siap dijalankan. Secara sederhana, pelaksanaan bisa dipahami sebagai penerapan yang hidup dari rencana itu sendiri. Majone dan Wildavsky menekankan pelaksanaan sebagai cermin evaluasi, sementara Browne dan Wildavsky memaknainya sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, membentuk harmoni gerak dalam sistem.

Makna pelaksanaan menyingkap esensi aktivitas yang berpadu dengan efektivitas, sebuah tarian tindakan dan mekanisme yang terstruktur. Mekanisme ini bukan sekadar rutinitas, melainkan kegiatan yang dirancang dengan kesungguhan,

berlandaskan norma, dan diarahkan untuk meraih tujuan yang ditetapkan.

Pelaksanaan meniscayakan serangkaian aktivitas yang menyeluruh, menyatukan semua rencana dan kebijakan yang telah digariskan. Ia menuntut kesiapan sarana, alat, dan pelaku, penentuan lokasi dan waktu, hingga metode yang harus ditempuh, membentuk proses berkelanjutan yang menuntun setiap langkah kebijakan menuju realisasi.

7. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan studi ini, penulis menelusuri dan merenungi jejak-jejak penelitian yang pernah dilaksanakan para peneliti terdahulu. Untuk menjaga orisinalitas dan menghindari tumpang tindih dalam penyajian, beberapa temuan dari penelitian sebelumnya dijadikan pijakan reflektif yang terkait dengan studi ini. Setidaknya terdapat sejumlah karya terdahulu yang menyingkap jenis penelitian serta variabel serupa dengan yang diteliti saat ini, sehingga menjadi landasan berpikir sekaligus cermin pembandingan dalam menata kerangka analisis, berikut rinciannya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terkait Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat (Kusmalina, 2018)	- Objek pariwisata - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	- Penelitian sebelumnya dilakukan pada Tahun 2018 - Lokasi penelitian sebelumnya di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat - Menggunakan teori Pitana dan Gayatri (2005)
2.	Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Mengembangkan Desa Wisata Berbasis Ekowisata di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasisiran Kabupaten Lumajang (Anindi Sukmawati, 2016)	Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara	- Penelitian sebelumnya dilakukan pada Tahun 2016 - Lokasi penelitian sebelumnya di Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasisiran Lumajang - Menggunakan teori Soerjono Soekanto
3.	Analisis Gaya Kepemimpinan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung (Mochammad Yogantara Danar Setyawan, 2021)	Menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi	- Penelitian sebelumnya dilakukan pada Tahun 2021 - Lokasi penelitian sebelumnya di Kabupaten Temanggung
4.	Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng (Ian Asriandy, 2016)	Menggunakan metode penelitian kualitatif	- Penelitian sebelumnya dilakukan pada Tahun 2016 - Lokasi penelitian sebelumnya di Kabupaten Bantaeng - Menggunakan teori David dan Fred (2008)

5.	Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur (Faizal Amri, 2020)	- Membahas budaya Pacu Jalur - Lokasi di Kuantan Singingi	- Penelitian sebelumnya dilakukan pada Tahun 2020 - Menggunakan teori George C. Edward III (1972)
6.	Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Wisata Festival Budaya Perahu Baganduang (Hengki Riadi, 2019)	- Membahas budaya yang ada di Kuantan Singingi - Lokasi di Kuantan Singingi	- Penelitian sebelumnya dilakukan pada Tahun 2019 - Membahas budaya yang beda di lokasi yang sama

Sumber: Olahan data penulis, 2025

Dari table di atas dapat diambil kesimpulan bahwa apapun itu kasusnya, penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu itu selalu terdapat perbedaan. Dimana perbedaan itu dapat dilihat dari masa atau waktu yang dilakukan, variabel judul penelitian, orang yang melakukan, lokasi penelitian dan analisis atau cara penyampaian dalam penelitian-penelitian tersebut.

8. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model mental atau struktur konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan informasi dan situasi. Ini adalah kerangka referensi yang membantu dalam pemrosesan informasi, membuat keputusan, dan bertindak yang bergantung pada konteks dan tujuannya.

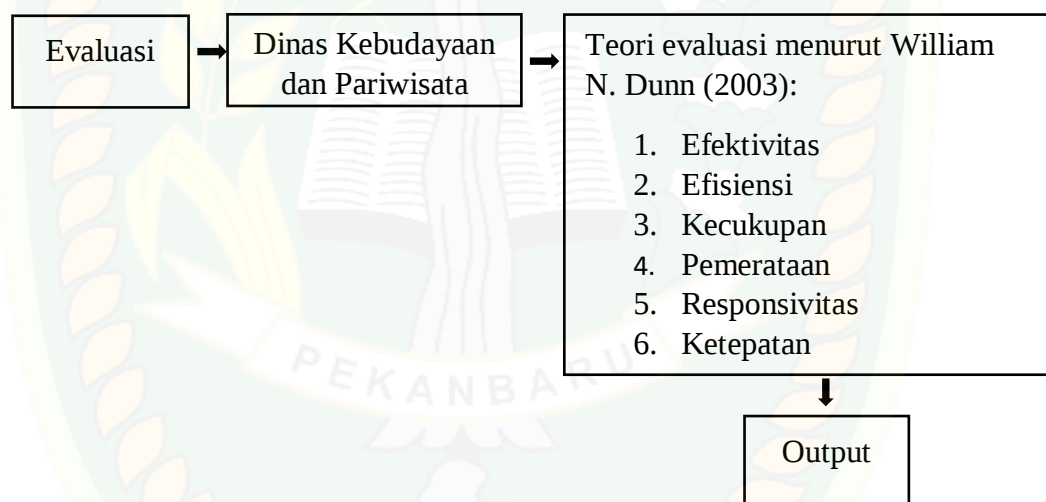
Setiap orang memiliki kerangka pikir yang berbeda, yang mencerminkan perspektif dan cara pandang mereka terhadap dunia. Kerangka pikir juga dapat berubah seiring waktu melalui pengalaman baru, pembelajaran, dan refleksi.

Budaya, nilai-nilai personal, Pendidikan, dan pengalaman hidup juga dapat memengaruhinya.

Persepsi seseorang terhadap situasi atau orang lain, serta cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, dapat dipengaruhi oleh kerangka pikir mereka, ini dapat digunakan dalam situasi tertentu, seperti analisis masalah atau pengambilan keputusan.

Berikut penulis rangkum beberapa poin penting pada kerangka pikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1: Kerangka Pikir



Sumber: Modifikasi Penulis, 2024

9. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur variabel yang diteliti secara konkret dan spesifik. Ketika sedang melakukan penelitian untuk skripsi, penulis akan meneliti variabel-variabel tertentu yang ingin penulis ketahui lebih lanjut. Konsep operasional

mengonversi konsep abstrak atau teoritis menjadi variabel yang dapat diukur secara empiris. Dengan menggunakan konsep operasional dengan baik, penulis dapat menghasilkan penelitian yang kuat dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang sedang penulis teliti.

Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah yang digunakan, maka perlu dioperasionalkan konsep penelitian ini sebagai berikut:

1. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur, menilai, atau menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memahami, memperbaiki, atau mengambil keputusan.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi adalah suatu badan atau kantor, yang mempunyai fungsi melaksanakan pengembangan objek dan aktivitas pariwisata, melaksanakan promosi budaya, sarana dan prasarana wisata.
3. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dan suatu tempat lain dengan maksud bahkan alasan berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan guna berpiknik dengan kegiatan lainnya.
4. Festival Pacu Jalur adalah pacuan sampan atau perahu besar dan panjang yang berisikan 40-60 orang. Kegiatan perlombaan dilaksanakan di Tepian Narosa Sungai Batang Kuantan.
5. Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide dengan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk pariwisata seperti halnya publisitas mengenai mempromosikan wisata.

6. Event yang diselenggarakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi harus melakukan suatu bentuk acara yang lebih diketahui oleh masyarakat seperti melakukan pameran.
7. Media/iklan adalah bidang promosi dan pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi membuat iklan tentang Pacu Jalur dan dibuat dalam media internet dan juga media cetak.
8. Transportasi dan akomodasi adalah calon wisatawan dalam mengambil keputusan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata akan sangat mempertimbangkan soal transportasi dan akomodasi.

10. Operasional Variabel

Tabel 2.2: Operasional Variabel Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang dinilai
1	2	3	4
Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment) (William N. Dunn:2003)	Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur.	1. Efektivitas	1. Hasil dari kegiatan Festival Budaya Pacu Jalur. 2. Dampak dari kebijakan yang diterapkan.
		2. Efisiensi	1. Usaha yang dilakukan. 2. Penggunaan anggaran.
		3. Kecukupan	1. Jangkauan usaha yang dihasilkan. 2. Kekurangan dan hambatan.
		4. Pemerataan	1. Biaya dan manfaat yang didistribusikan. 2. Akses yang setara.

		5. Responsivitas	1. Kepuasan dari hasil pelaksanaan. 2. Kebutuhan masyarakat.
		6. Ketepatan	1. Kegunaan dan nilai dari hasil tujuan. 2. Kesesuaian solusi.

Sumber: Olahan Data Penulis, 2024.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif memberikan kontribusi penting dalam penelitian sosial dan humaniora, terutama untuk memahami fenomena yang kompleks dan sulit diukur secara numerik.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kuantan Singingi dan di Bagian Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi ini karena kegiatan Pacu Jalur menjadi objek utama wisata di Kabupaten Kuantan Singingi, dan masuk ke dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi pada setiap tahunnya.

Tabel 3.1: Jumlah Informan Dalam Penelitian

No.	Informan		
	Subjek	Key	Informan
1.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	-
2.	Kepala Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	1
3.	Masyarakat atau pengunjung	-	1
4.	Atlet yang ikut berpartisipasi dalam budaya pacu jalur	-	2
Jumlah			5

Sumber: Olahan Data Penulis, 2024.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data umum/pokok penelitian, adalah berupa data hasil wawancara tentang strategi implementasi kegiatan Budaya Pacu Jalur pada Bagian Pengebangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung penelitian ini merupakan suatu profil, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini ada beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah fenomena yang berkaitan dengan kegiatan Budaya Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, pengamatan tidak boleh diabaikan selama proses dokumentasi karena dokumentasi adalah bagian penting dari proses penelitian.

2. Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara dengan Sekretaris dan Kepala Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara langsung atau tatap muka. Fokus wawancara adalah strategi untuk mendorong kegiatan Budaya Pacu Jalur.

3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data mengenai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi maka digunakanlah dokumentasi, yaitu data mengenai profil atau sejarah, struktur organisasi, maupun tugas pokok dan fungsinya.

4. Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan tidak dapat untuk dihindari, karena ini digunakan untuk memperoleh data-data, teori, referensi, dan artikel yang berasal dari buku, jurnal dan panduan lainnya yang mengandung atau sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis dan data penelitian ini, analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Data wawancara akan dianalisis dengan teknik deskriptif atau penjabaran. Dimana hasil wawancara akan diuraikan dan dijelaskan sesuai dengan permasalahan penelitian.

6. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2: Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2026																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
1.	Penyusunan Proposal																								
2.	Ujian Proposal																								
3.	Revisi Proposal																								
4.	Riset																								
5.	Survey Lapangan																								
6.	Analisis Data																								
7.	Konsultasi Revisi Skripsi																								
8.	Ujian Komprehensif																								
9.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																								
10.	Pengandaan Skripsi																								

Sumber: Olahan Data, Penulis.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Historis

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Kota Teluk Kuantan. Pertama kali menjadi Kabupaten, Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Bupati bernama Rusdji S. Abrus, yaitu pada Tanggal 8 Oktober 1999 hingga Agustus 2001. Pada tanggal 20 Agustus 2001, yang menjabat sebagai Bupati Kuantan Singingi adalah Asrul Ja'afar, dan berakhir pada tanggal 1 Juni 2006. Kepemimpinan Bupati Kuantan Singingi berpindah ke Sukarmis Pada tanggal 1 Juni 2006 hingga 1 Juni 2016. Mulai dari tanggal 1 Juni 2016, Bupati Kuantan Singingi dijabat oleh Mursini hingga tanggal 1 Juni 2021. Semenjak menjadi Kabupaten hingga sekarang, Kabupaten Kuantan Singingi telah dipimpin oleh 6 orang Bupati dan Wakil Bupati.

B. Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 wilayah Kecamatan, Dan setiap Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Dari 15 Kecamatan, terdapat 218 Desa, dan 11 Kelurahan. Tidak semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan

Singingi memiliki wilayah Kelurahan. Kecamatan Yang memiliki Kelurahan adalah Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa/Kelurahan
1.	Kuantan Mudik	23	1	24
2.	Hulu Kuantan	12	-	12
3.	Gunung Toar	14	-	14
4.	Pucuk Rantau	10	-	10
5.	Singingi	13	1	14
6.	Singingi Hilir	12	-	12
7.	Kuantan Tengah	20	3	23
8.	Sentajo Raya	14	1	15
9.	Benai	15	1	16
10.	Kuantan Hilir	14	2	16
11.	Pangean	17	-	17
12.	Logas Tanah Darat	15	-	15
13.	Kuantan Hilir Seberang	14	-	14
14.	Cerenti	11	2	13
15.	Inuman	14	-	14
	Kabupaten Kuantan Singingi	218	11	229

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2024

Dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 7 Kecamatan yang tidak memiliki wilayah kelurahan, yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Singingi

Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, dan Kecamatan Inuman.

C. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pada mulanya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi disebut dengan Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengalami 5 kali perpindahan kantor, karena belum Adanya komplek perkantoran khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hingga Tahun 2007. Dimana dari tahun 2002 hingga tahun 2007, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pernah berlokasi di:

- 1) Desa Sawah Taluk Kuantan pada tahun 2002-2003
- 2) Desa Koto Taluk Kuantan pada tahun 2003-2004
- 3) Kelurahan Simpang Tiga Taluk Kuantan pada tahun 2004-2005
- 4) Kantor Wisma Jalur pada tahun 2005-2007

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat dalam penelitian ini menurut data yang didapatkan yaitu melalui wawancara. Pemilihan informan didasarkan atas kepentingan penelitian, jumlah informan yang dimaksud penulis dianggap mampu memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat ini.

Tabel 5.1: Informan Pada Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur

No.	Nama	Keterangan
1.	Ahmad Herry GN., S.Pi, M.Si	Key informan
2.	Ovi Arlianti S.STP	Informan
3.	David Chaniago	Informan
4.	Trinandi Kurnia Akbar	Informan
5.	Wendra Zulfa Hendri	Informan
6.	Teddy Pratama Mahendra	Informan

Sumber: Olahan Data Penulis, 2025

Informan dalam penelitian ini terdiri dari satu orang Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak sebagai Key Informan dalam penelitian ini, dan beberapa informan lainnya adalah satu orang Kepala Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi, serta tiga orang masyarakat atau atlet Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun identitas informan penelitian seperti jenis kelamin, Pendidikan dan pekerjaan/jabatan, sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Data informan jenis kelamin ini merupakan sebagai bahan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian. Yang terkhusus dalam mengetahui Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur.

Tabel 5.2: Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Informan
1.	Laki-laki	5
2.	Perempuan	1
Jumlah		6

Sumber: Olah Data Penulis, 2024

Informan menurut jenis kelamin dari table di atas 5 orang informan laki-laki dan 1 perempuan, dengan jumlah keseluruhan informan sebanyak 5 orang. Yang diharapkan bahwa dalam penelitian ini informan adalah individu yang memahami kondisi yang terjadi.

2. Pendidikan

Secara teoritis Pendidikan terakhir dapat mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dengan melibatkan beberapa unsur, oleh sebab

itu informan berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada table berikut:

Tabel 5.3: Informan Berdasarkan Pendidikan Pada Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur

No.	Pendidikan	Jumlah Informan
1.	SD	-
2.	SMP	-
3.	SLTA	3
4.	S1	2
5.	S2	1
6.	S3	-
Jumlah		6

Sumber: Olahan Data Penulis, 2025

Pendidikan terakhir ini berfungsi untuk mengetahui seberapa konkritnya jawaban yang diberikan atas dasar pengalaman ilmu yang didapatkan oleh informan. Yang mana terdiri dari 6 informan. Diantaranya 3 orang Pendidikan SLTA, 2 orang yang pendidikannya S1 dan 1 orang yang pendidikannya S2.

3. Pekerjaan/Jabatan

Dalam menentukan informan, dapat dilihat melalui beberapa faktor pekerjaan/jabatan, yang mana dengan mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan

pilihan. Pekerjaan/jabatan merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas dalam hidupnya. Dikarenakan pekerjaan/jabatan dijadikan indikator dalam menentukan pengalaman dan pemahaman terhadap suatu bidang yang terkait dengan pekerjaan/jabatannya. Pekerjaan/jabatan informan dalam penelitian ini dapat diterapkan pada table berikut:

Tabel 5.4: Informan Berdasarkan Pekerjaan/Jabatan Pada Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur

No.	Pekerjaan/Jabatan	Jumlah Informan
1.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi	1
2.	Kepala Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Siingingi	1
3.	Buruh	4
Jumlah		6

Sumber: Olahan Data Penulis, 2025

Dari table di atas, informan berdasarkan pekerjaan/jabatan yang terdiri dari 5 orang dengan pekerjaan/jabatan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi 1 orang, Kepala Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi 1 orang serta sebagai buruh 3 orang.

B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur

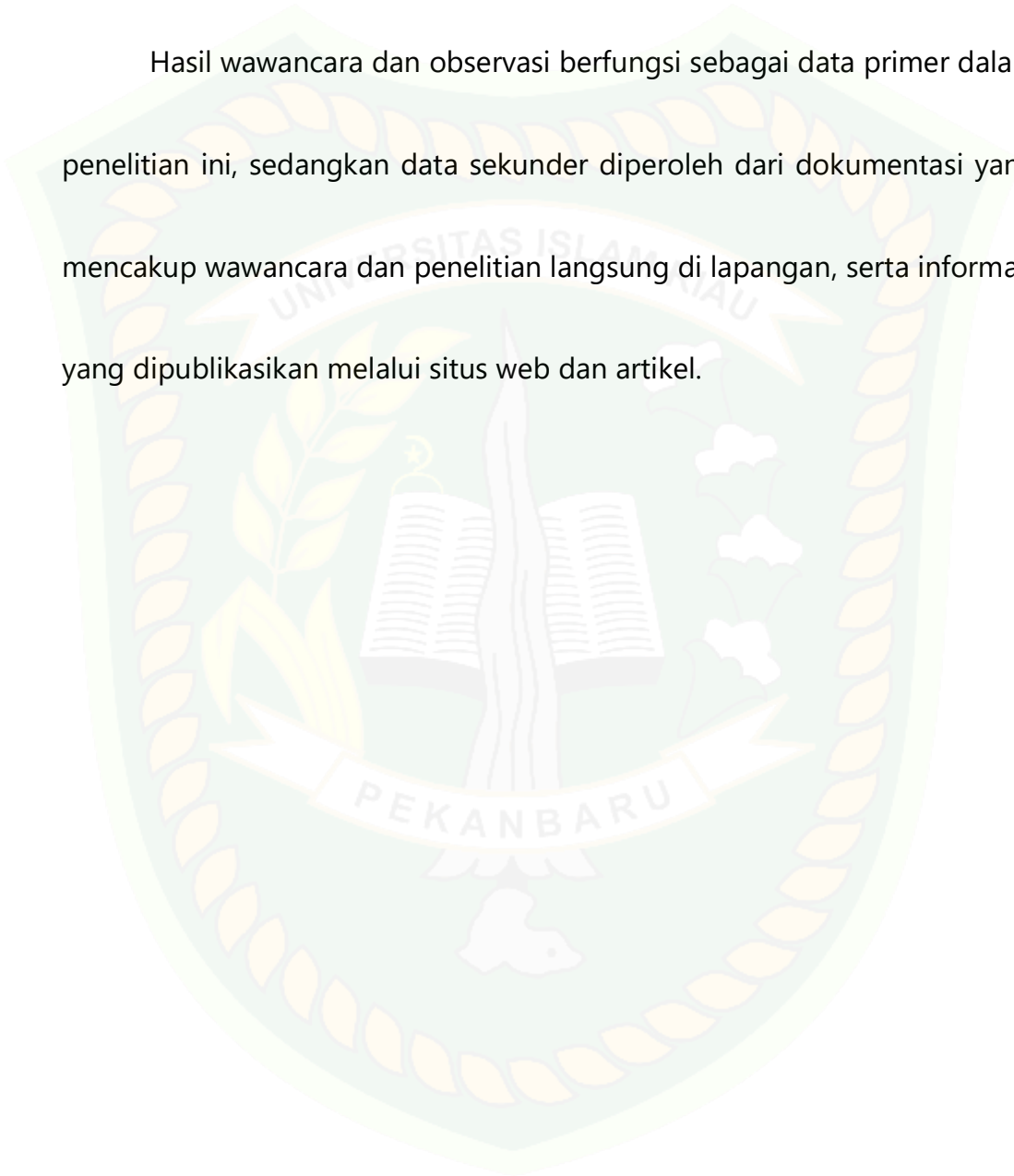
Dalam Pembahasan hal ini, Penulis akan menguraikan dan memaparkan mengenai hasil penelitian tentang Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur. Penelitian ini menfokuskan bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi terhadap pelaksanaan Budaya Pacu Jalur. Penelitian ini memperoleh data melalui hasil Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Dalam penelitian ini, sebagaimana yang dijelaskan di atas, data yang diperoleh oleh penulis berasal dari wawancara yang dipilih sesuai dengan kriteria yang dianggap penulis dapat mewakili dari penelitian yang telah diangkat. Narasumber terpilih adalah orang yang mengetahui, memahami dan ikut terlibat tentang pelaksanaan kebijakan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan

Budaya Pacu Jalur

Hasil wawancara dan observasi berfungsi sebagai data primer dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang mencakup wawancara dan penelitian langsung di lapangan, serta informasi yang dipublikasikan melalui situs web dan artikel.



Wawancara yang dilakukan oleh penulis melibatkan proses tanya jawab secara langsung, baik secara lisan maupun melalui alat komunikasi, dengan penulis dan narasumber untuk memahami aspek-aspek penting dalam penelitian ini.

Wawancara mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti mengenai pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru terhadap aplikasi Layanan Tunggu. Berdasarkan indikator variabel penelitian yang diantaranya adalah:

1. Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana program pelestarian budaya Pacu Jalur telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas mencerminkan keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola, mengembangkan, serta mempromosikan budaya tersebut kepada masyarakat. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, efektivitas juga mencakup pencapaian target partisipasi masyarakat dan dampak budaya terhadap pariwisata daerah. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi program budaya ini.

a. Hasil Kegiatan Budaya Pacu Jalur

Hasil kegiatan merujuk pada pencapaian nyata dari pelaksanaan kegiatan budaya Pacu Jalur yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hasil kegiatan dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat, peningkatan jumlah wisatawan, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, hasil juga mencakup seberapa besar dampak kegiatan tersebut terhadap peningkatan kesadaran budaya di kalangan generasi muda. Dengan menilai hasil kegiatan, dapat diketahui sejauh mana tujuan utama program budaya ini telah berhasil dicapai. Berikut hasil wawancara penulis dengan Key Informan:

“Kegiatan Pacu Jalur memberikan dampak yang sangat positif bagi daerah. Selain berhasil melestarikan tradisi lokal, acara ini juga meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui UMKM, serta memperkuat identitas budaya Kuantan Singingi. Partisipasi masyarakat semakin tinggi setiap tahunnya, dan promosi acara juga semakin luas setelah masuk dalam program Karisma Event Nusantara (KEN).” (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:05 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan budaya Pacu Jalur memberikan dampak yang signifikan terhadap pelestarian budaya, peningkatan kunjungan wisata, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat yang terus meningkat serta dukungan promosi melalui program nasional menunjukkan bahwa Pacu Jalur berhasil menjadi salah satu ikon budaya yang memperkuat identitas daerah Kuantan Singingi.

Ibu Ovi Arlianti menyatakan:

“Pelaksanaan Pacu Jalur memberikan hasil yang sangat positif. Selain memperkuat pelestarian budaya lokal, kegiatan ini juga meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Partisipasi masyarakat terus meningkat, dan kesadaran terhadap pentingnya warisan budaya juga semakin tumbuh, terutama di

kalangan generasi muda." (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, Tanggal 25 April 2025, pukul 10:10 WIB).

Dari wawancara tersebut kegiatan budaya Pacu Jalur telah memberikan dampak positif yang luas, baik dalam pelestarian budaya, peningkatan kunjungan wisatawan, maupun penguatan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki



masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya menjaga warisan budaya daerah.

David Chaniago menyatakan bahwa:

“Saya merasa bangga karena Pacu Jalur mampu menjaga dan memperkenalkan budaya khas Kuantan Singingi kepada generasi muda serta pengunjung dari luar daerah. Banyak pedagang lokal yang merasa ada peningkatan pendapatan selama pelaksanaan acara. Kegiatan ini juga membuka peluang usaha di sector UMKM, kuliner, dan cinderamata. Pacu Jalur menjadi daya tarik yang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Ini membantu meningkatkan nama baik Kabupaten Kuantan Singingi di tingkat nasional bahkan internasional. Tradisi Pacu Jalur memperkuat rasa kebersamaan antar masyarakat desa, terutama dalam proses persiapan jalur untuk mengikuti perlombaan”. (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 16:15 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pacu Jalur memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Tradisi ini tidak hanya berhasil melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda dan wisatawan luar daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, kuliner, dan penjualan cinderamata. Selain itu, kegiatan ini mampu menarik wisatawan, memperkuat citra daerah di tingkat nasional hingga internasional, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong antar warga desa.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

"Menurut saya, hasilnya sangat baik. Pacu Jalur berhasil menarik perhatian banyak orang, baik dari dalam maupun luar daerah. Selain itu, kegiatan ini membuat kami sebagai masyarakat merasa bangga dengan budaya sendiri. Perekonomian juga ikut meningkat karena banyak pedagang yang berjualan saat acara berlangsung." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 14:20 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan budaya Pacu Jalur memberikan hasil yang sangat positif. Kegiatan ini tidak hanya berhasil menarik perhatian publik dari berbagai daerah, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap budaya lokal serta memberikan dampak ekonomi melalui meningkatnya aktivitas perdagangan selama acara berlangsung.

Wendra Zulfa Hendi menyatakan:

"Saya melihat hasilnya sangat baik. Setiap tahun acaranya semakin meriah dan terorganisir. Banyak wisatawan datang, jadi daerah kita semakin dikenal luas. Selain itu, anak-anak muda juga mulai tertarik ikut terlibat, baik sebagai peserta maupun panitia. Ini bagus untuk menjaga budaya kita agar tetap hidup." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, 26 April 2025, pukul 17:20 WIB).

Dari wawancara tersebut, disimpulkan bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan budaya Pacu Jalur dinilai sangat baik oleh masyarakat. Kegiatan ini semakin meriah dan terorganisir setiap tahunnya, mampu menarik wisatawan, serta meningkatkan popularitas daerah. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan ini menjadi indikasi positif terhadap upaya pelestarian budaya secara berkelanjutan.

b. Dampak Kebjiakan

Dampak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan, termasuk kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan terhadap pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Dalam konteks ini, Pacu jalur sebagai warisan budaya tak benda yang menjadi ikon Kabupaten Kuantan Singingi, menjadi objek strategis untuk melihat sejauh mana kebijakan yang

diterapkan mampu memberikan pengaruh nyata bagi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya.

Ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai perubahan yang terjadi sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari kebijakan tersebut. Dengan mengkaji dampaknya, peneliti dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi budaya Pacu Jalur di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Berikut hasil wawancara penulis dengan Key informan, menyatakan bahwa:

“Secara umum, pelaksanaan Pacu Jalur memberikan dampak yang sangat positif bagi Kabupaten Kuantan Singingi, baik dari segi pelestarian budaya, sosial kemasyarakatan, maupun sektor ekonomi. Dari sisi budaya, acara ini menjadi media strategis untuk menjaga dan mewariskan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda. Kami selalu mendorong partisipasi sekolah-sekolah dan komunitas pemuda agar ikut terlibat dalam proses pelestariannya. Kami di dinas juga melihat bahwa kegiatan ini berdampak langsung terhadap peningkatan citra daerah. Pacu Jalur bukan hanya menjadi agenda lokal, tapi telah menjadi kalender wisata nasional yang turut mengenalkan Kuantan Singingi ke tingkat yang lebih luas”. (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:10 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, pelaksanaan Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi memberikan dampak positif dalam pelestarian budaya, penguatan nilai sosial, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga berperan penting dalam membangun citra daerah hingga dikenal di tingkat nasional melalui kalender wisata.

Ibu Ovi Arlianti menjelaskan:

"Kebijakan yang diterapkan sejauh ini memberikan dampak positif, terutama dalam memperkuat pelestarian budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dukungan anggaran, promosi, serta kerja sama lintas sektor membuat pelaksanaan kegiatan semakin terstruktur. Hal ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM dan pariwisata." (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 10:15 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan budaya Pacu Jalur memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, seperti pelestarian budaya, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Dukungan kebijakan yang mencakup pendanaan, promosi, dan sinergi antar pihak turut memperkuat pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

David Chaniago menyatakan:

"Kebijakan pemerintah sangat membantu kami. Saat Pacu Jalur berlangsung, pendapatan saya meningkat karena banyak pengunjung yang membeli dagangan. Pemerintah juga memberikan ruang usaha yang tertata, jadi kami merasa diperhatikan." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 16:20 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, kebijakan pemerintah dalam kegiatan Pacu Jalur memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta menciptakan ruang usaha yang tertata dan mendukung, sehingga pelaku UMKM merasa diperhatikan dan diakomodasi dengan baik.

Trinandi Kurnia Akbar menjelaskan:

"Saya melihat kebijakan pemerintah berdampak baik karena banyak sekolah dilibatkan. Adik saya juga ikut tampil dalam parade budaya. Jadi, selain hiburan, ada juga nilai edukasi yang diberikan, terutama untuk generasi muda." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 14:25 WIB).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam kegiatan budaya Pacu Jalur berdampak positif terhadap aspek edukasi dan pelibatan generasi muda. Melalui keterlibatan sekolah dan partisipasi pelajar

dalam kegiatan budaya, kebijakan tersebut berhasil menjadi sarana pembelajaran sekaligus pelestarian budaya di kalangan generasi penerus.

Wendra Zulfa Hendri menyatakan:

"Kebijakan pemerintah sangat bagus karena acara ini makin besar tiap tahun. Kami sebagai pemuda bisa ikut terlibat sebagai relawan atau panitia. Ini membuat kami merasa punya peran dalam menjaga budaya daerah." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 17:25 WIB).

Dari wawancara di atas, kebijakan pemerintah terhadap kegiatan Pacu Jalur memberikan dampak positif dalam meningkatkan peran serta pemuda. Keterlibatan sebagai relawan atau panitia memberikan ruang bagi generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam pelestarian budaya, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap warisan budaya daerah.

Teddy Pratama Mahendra mengatakan:

"Dari segi ekonomi, saya dan warga lainnya merasa sangat terbantu karena bisa berjualan dan membuka jasa parkir. Tapi dari segi kenyamanan, lalu lintas menjadi padat dan macet total dan suasana menjadi lebih bising dari biasanya. Terkait pedagang dari luar daerah. Saya sendiri tidak keberatan selama mereka tertib dan menjaga kebersihan." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Januari 2026, pukul 14:40 WIB).

2. Efisiensi

Dalam mengevaluasi pelaksanaan sebuah program atau kegiatan, termasuk kegiatan budaya seperti Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi efisiensi sangat penting. Indikator ini menitikberatkan pada sejauh mana sumber daya baik dana,

tenaga, maupun waktu dikelola secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam konteks Pacu Jalur, penilaian efisiensi tidak hanya dilihat dari kelancaran pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari bagaimana pengelolaan anggaran, keterlibatan sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga mampu berjalan dengan efektif tanpa pemborosan.

Melalui indikator efisiensi ini, peneliti berupaya menilai apakah pelaksanaan Pacu Jalur sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki, serta seberapa besar nilai manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan input yang dikeluarkan.

a. Usaha Yang Dilakukan

Dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal, diperlukan berbagai bentuk usaha nyata dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku budaya. Sub indikator usaha yang dilakukan berfokus pada upaya-upaya konkret yang telah dirancang dan dilaksanakan guna mempertahankan, mengembangkan, dan mempromosikan tradisi Pacu Jalur sebagai warisan budaya masyarakat Kuantan Singingi. Begini tanggapan dari Key informan:

“Pacu Jalur terus kami jaga dan lestarikan melalui berbagai upaya. Pertama, kami secara rutin menyelenggarakan Festival Pacu Jalur setiap tahunnya, baik di tingkat rayon maupun tingkat nasional. Ini menjadi ajang penting dalam memperkuat identitas budaya dan menarik perhatian wisatawan dari luar daerah. Kedua, kami juga melakukan pembinaan kepada generasi muda melalui sekolah-sekolah, sanggar budaya, dan pelatihan yang melibatkan tokoh-tokoh adat serta masyarakat pelestari budaya. Harapannya, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Pacu Jalur bisa dipahami dan diteruskan oleh generasi penerus. Selain itu, kami juga melakukan promosi melalui media sosial, dokumentasi digital, serta kerja sama dengan kementerian dan pihak swasta untuk mendukung pelestarian dan pengembangan kegiatan ini. Salah satu contoh nyata adalah upaya kami mendaftarkan Pacu Jalur sebagai Warisan

Budaya Tak Benda Nasional, dan saat ini sudah tercatat secara resmi di tingkat nasional. (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:15 WIB).

Dari hasil wawancara di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai upaya dalam melestarikan budaya Pacu Jalur, seperti menyelenggarakan festival tahunan, membina generasi muda melalui pendidikan dan pelatihan, mempromosikan budaya melalui media digital, serta mendukung pendanaan bagi pelestarian perahu jalur di desa-desa. Semua langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan Pacu Jalur sebagai warisan budaya yang membanggakan masyarakat Kuantan Singingi.

Ibu Ovi Arlianti menjelaskan:

“Usaha yang kami lakukan cukup beragam. Kami secara konsisten menyelenggarakan kegiatan Pacu Jalur setiap tahun dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Selain itu, kami juga berupaya mengangkat nilai budaya ini ke tingkat yang lebih luas melalui dokumentasi, pelatihan, dan pameran budaya.” (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 10:20 WIB).

Dari wawancara tersebut, disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi secara aktif melaksanakan berbagai upaya untuk melestarikan budaya Pacu Jalur. Melalui penyelenggaraan rutin, pelibatan masyarakat, serta kegiatan dokumentasi, pelatihan, dan pameran budaya, dinas berkomitmen menjaga eksistensi dan memperluas jangkauan budaya Pacu Jalur agar tetap hidup dan dikenal secara luas oleh masyarakat lintas generasi.

David Chaniago menyatakan:

“Kalau saya lihat, pemerintah sudah cukup baik. Setiap tahun acara Pacu Jalur tetap dilaksanakan, dan makin ramai. Jalan menuju lokasi juga mulai dibenahi. Tapi menurut saya, pembinaan ke anak-anak muda masih perlu ditingkatkan,

supaya mereka tahu dan mau melanjutkan tradisi ini.” (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 16:25 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dalam melestarikan budaya Pacu Jalur dinilai cukup baik, terutama dalam hal pelaksanaan rutin acara dan perbaikan infrastruktur. Namun, masih terdapat harapan agar pemerintah lebih meningkatkan pembinaan kepada generasi muda agar mereka turut aktif dalam menjaga dan meneruskan tradisi budaya tersebut.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

“Cukup terasa dampaknya, apalagi buat para pedagang. Pemerintah membantu promosi, jadi pengunjung banyak, dagangan juga laku. Tapi soal fasilitas seperti tempat berdagang dan kebersihan masih bisa diperbaiki lagi. Itu akan lebih mendukung kelancaran acara.” (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 14:30 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mendukung budaya Pacu Jalur sudah dirasakan manfaatnya, terutama dalam hal promosi yang meningkatkan jumlah pengunjung dan berdampak positif bagi pelaku usaha kecil. Namun demikian, masih diperlukan perhatian lebih terhadap penyediaan fasilitas berdagang dan kebersihan area acara agar pelaksanaannya semakin optimal dan nyaman bagi semua pihak.

Wendra Zulfa Hendri menyatakan:

“Menurut saya, pemerintah sudah cukup aktif dalam menyelenggarakan kegiatan Pacu Jalur setiap tahunnya. Kegiatan ini tetap eksis dan semakin dikenal luas. Namun, saya rasa peran pemuda masih kurang diberdayakan secara maksimal. Akan lebih baik jika ada program pelatihan atau edukasi khusus untuk kami, agar kami bisa lebih terlibat langsung, tidak hanya dalam acara utama, tapi juga dalam proses pelestariannya dari awal sampai akhir.” (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 17:30 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjaga budaya Pacu Jalur sudah cukup baik melalui penyelenggaraan rutin setiap tahun. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk lebih memberdayakan peran generasi muda melalui pelatihan dan keterlibatan aktif, agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya secara menyeluruh.

b. Penggunaan Anggaran

Ini hasil wawancara penulis dengan Key informan:

“Penggunaan anggaran untuk kegiatan Pacu Jalur kami upayakan seefisien dan setransparan mungkin. Setiap tahun kami menyusun rencana anggaran berbasis kebutuhan riil, mulai dari persiapan acara, dukungan logistik, promosi, hingga pelibatan pelaku seni dan budaya lokal. Dana tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan prapertandingan, pelestarian nilai budaya, serta penyediaan fasilitas penunjang untuk pengunjung dan peserta.” (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:20 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan budaya Pacu Jalur oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan secara efisien dan transparan. Anggaran dialokasikan berdasarkan kebutuhan riil, mencakup berbagai aspek seperti persiapan acara, logistik, promosi, pelibatan pelaku budaya, serta penyediaan fasilitas pendukung. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus memastikan kegiatan berjalan dengan optimal.

Ibu Ovi Arlianti menyatakan:

“Penggunaan anggaran merupakan aspek penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program kebudayaan. Dalam konteks kegiatan Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, alokasi dan pemanfaatan dana yang tepat sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan acara, mulai dari tahap

persiapan hingga pelaksanaan. Ini bertujuan untuk melihat sejauh mana anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Pacu Jalur. Penilaian ini mencakup transparansi pengelolaan dana, kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan, serta dampaknya terhadap kualitas kegiatan yang diselenggarakan”. (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 10:25 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Pacu Jalur dinilai telah berjalan cukup efektif dan tepat sasaran. Anggaran difokuskan pada kegiatan inti seperti penyelenggaraan festival, pembinaan tim jalur, promosi budaya, serta pelestarian nilai-nilai tradisi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memastikan agar dana yang dialokasikan mampu mendukung kelangsungan kegiatan secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaannya.

David Chaniago menyatakan:

“Secara umum penggunaannya cukup baik. Kegiatan tetap berjalan setiap tahun dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya, terutama dari sisi ekonomi dan hiburan. Tapi saya berharap transparansi anggaran bisa lebih ditingkatkan, agar masyarakat tahu dana yang digunakan dialokasikan ke mana saja.” (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 16:30 WIB).

Dari wawancara di atas, penggunaan anggaran oleh pemerintah dalam kegiatan budaya Pacu Jalur dinilai sudah cukup baik karena kegiatan rutin tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, beliau juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat lebih memahami alokasi dana yang digunakan dalam setiap kegiatan.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

“Saya tidak tahu secara rinci soal anggarannya, tapi saya lihat pemerintah banyak membantu, misalnya dengan menyediakan tenda dan promosi. Tapi kadang fasilitas seperti tempat sampah atau tempat jualan masih kurang. Mungkin anggarannya belum cukup, atau perlu lebih diperhatikan lagi bagian seperti itu.” (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 14:35 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak mengetahui secara rinci penggunaan anggaran, ia merasakan adanya dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitas seperti tenda dan promosi. Namun, beberapa aspek penting seperti kebersihan dan fasilitas berdagang dinilai masih kurang optimal, sehingga penggunaan anggaran diharapkan bisa lebih merata dan memperhatikan kebutuhan dasar pelaku usaha kecil di lokasi acara.

Wendra Zulva Hendri menjelaskan:

“Dari apa yang saya amati, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk acara ini secara rutin. Tapi saya rasa masih bisa lebih efektif, misalnya untuk kegiatan edukasi budaya di sekolah atau pelatihan bagi pemuda. Jadi bukan hanya untuk acara besar saja, tapi juga untuk pengembangan nilai budaya jangka panjang.” (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 17:35 WIB).

Dari wawancara di atas, disimpulkan bahwa pemerintah dinilai telah rutin mengalokasikan anggaran untuk kegiatan budaya Pacu Jalur. Namun, efektivitas penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek edukasi dan pelibatan generasi muda. Ia menyarankan agar anggaran tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan acara besar, tetapi juga diarahkan untuk program jangka panjang yang mendukung pelestarian nilai budaya secara berkelanjutan.

3. Kecukupan

Kecukupan berfungsi untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia baik dana, tenaga, sarana, maupun waktu yang telah mencukupi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Dalam konteks Pacu Jalur sebagai agenda budaya tahunan di Kabupaten Kuantan Singingi, kecukupan menjadi tolok ukur penting dalam menjawab pertanyaan apakah kebutuhan dasar pelaksanaan kegiatan telah terpenuhi dengan memadai.

a. Pencapaian Usaha

Setiap usaha atau upaya pelestarian budaya tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini, Pacu Jalur sebagai warisan budaya masyarakat Kuantan Singingi tidak hanya dilestarikan melalui berbagai kegiatan dan program, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan capaian tertentu yang berdampak nyata bagi masyarakat dan daerah. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Key informan, menyatakan:

“Alhamdulillah, kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, usaha yang kami lakukan dalam pelestarian Pacu Jalur telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Salah satu pencapaian besar adalah diakuinya Pacu Jalur sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini merupakan pengakuan resmi yang menunjukkan bahwa upaya pelestarian kita mendapat perhatian di tingkat nasional”. (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:25 WIB).

Dari wawancara di atas, usaha pelestarian Pacu Jalur yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menunjukkan pencapaian yang positif, seperti diakuinya Pacu Jalur sebagai Warisan Budaya Tak Benda, meningkatnya

partisipasi masyarakat dan generasi muda, serta dampak ekonomi yang dirasakan pelaku UMKM dan sektor pariwisata lokal.

Ibu Ovi Arlianti menyatakan:

“Pencapaiannya cukup memuaskan. Kami berhasil mempertahankan penyelenggaraan Pacu Jalur sebagai agenda tahunan yang dinanti masyarakat. Bahkan, sejak tahun 2022 hingga 2024, Pacu Jalur masuk dalam program Karisma Event Nusantara (KEN) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini menjadi bukti bahwa event ini tidak hanya berdampak secara lokal, tapi juga mendapat perhatian nasional.” (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 10:30 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, pencapaian pemerintah dalam kegiatan budaya Pacu Jalur tergolong signifikan. Keberhasilan menjaga kontinuitas acara sebagai agenda tahunan dan masuknya Pacu Jalur ke dalam program Karisma Event Nusantara (KEN) menunjukkan bahwa kegiatan ini telah memberikan dampak positif, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga mendapat pengakuan di tingkat nasional. Hal ini menjadi indikator keberhasilan usaha pelestarian budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

David Chaniago menyatakan:

“Saya melihat pencapaiannya sudah bagus. Setiap tahun acaranya makin meriah dan ramai pengunjung. Jalan dan fasilitas juga mulai diperbaiki. Masyarakat merasa lebih bangga karena budaya kita jadi dikenal luas, bahkan sampai ke luar daerah.” (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 16:35 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan pencapaian usaha pemerintah dalam kegiatan Pacu Jalur dinilai positif. Penyelenggaraan yang semakin meriah tiap tahun, peningkatan fasilitas, serta bertambahnya jumlah pengunjung menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperkenalkan

budaya Pacu Jalur secara lebih luas. Hal ini turut menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan budaya daerah.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

“Pemerintah sudah cukup berhasil, terutama dalam menarik banyak pengunjung. Para pedagang juga ikut merasakan dampaknya karena penghasilan meningkat. Tapi diharapkan ke depan fasilitas untuk pedagang bisa lebih ditata, supaya makin nyaman dan tertib.” (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 14:40 WIB).

Dari wawancara di atas, pemerintah dinilai berhasil dalam meningkatkan daya tarik kegiatan Pacu Jalur, yang berdampak positif terhadap pendapatan pedagang. Namun, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan penataan fasilitas bagi pedagang agar pelaksanaan kegiatan ke depannya lebih nyaman, tertib, dan mendukung kelangsungan ekonomi masyarakat secara optimal.

Wendra Zulva Hendri menyatakan:

“Cukup terlihat pencapaiannya, apalagi sejak Pacu Jalur masuk dalam agenda nasional. Pemerintah juga mulai melibatkan generasi muda, misalnya lewat kegiatan seni atau lomba budaya. Tapi saya rasa perlu lebih banyak program berkelanjutan agar kami bisa terus berperan dalam pelestarian budaya.” (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 17:40 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian pemerintah dalam kegiatan budaya Pacu Jalur cukup terlihat, terutama dengan masuknya acara tersebut ke dalam agenda nasional dan adanya pelibatan generasi muda. Namun, masih diperlukan program yang bersifat berkelanjutan agar peran generasi muda dalam pelestarian budaya tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi bagian aktif dalam menjaga warisan budaya jangka panjang.

b. Kekurangan dan Hambatan

Kegiatan budaya seperti Pacu Jalur, tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan hambatan yang dihadapi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Identifikasi terhadap kekurangan dan hambatan ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan, agar pelestarian budaya dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam konteks Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, hambatan yang muncul dapat berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, atau minimnya fasilitas pendukung. Sementara dari faktor eksternal, dapat berupa kurangnya kesadaran masyarakat, pengaruh modernisasi, hingga fluktuasi dukungan dari pihak luar. Ini hasil wawancara dengan Key informan:

“Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran. Meskipun kegiatan ini rutin masuk dalam kalender tahunan, namun kebutuhan dana yang cukup besar sering kali tidak sepenuhnya bisa terpenuhi, terutama untuk pembinaan jalur di tingkat desa dan peningkatan kualitas acara. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga masih menjadi kendala. Beberapa lokasi pacu masih membutuhkan perbaikan, seperti fasilitas penonton, pengamanan, dan akses jalan menuju arena. Belum lagi, koordinasi antar pihak baik dari OPD lain, pemerintah desa, maupun masyarakat kadang belum berjalan maksimal, terutama dalam hal persiapan teknis dan promosi acara”. (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:30 WIB).

Jadi dari wawancara di atas, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan bahwa pelaksanaan Pacu Jalur masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta koordinasi yang belum optimal antar pihak terkait.

Ibu Ovi Arlianti Menyatakan:

"Salah satu kekurangan yang masih kami hadapi adalah keterbatasan anggaran yang belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung semua aspek kegiatan, terutama dalam hal promosi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Selain itu, masih ada hambatan dari segi koordinasi antar instansi dan keterlibatan masyarakat yang belum merata di setiap kecamatan. Kami juga menghadapi tantangan dalam mengedukasi generasi muda agar lebih peduli dan aktif terlibat dalam melestarikan budaya ini." (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, Tanggal 25 April 2025, pukul 10:35 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan budaya Pacu Jalur masih menemui beberapa hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kurang optimalnya koordinasi lintas instansi, serta partisipasi masyarakat dan generasi muda yang belum maksimal. Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar pelestarian budaya Pacu Jalur dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

David Chaniago Menyatakan:

"Saya melihat biaya untuk area pedagang lumayan mahal, sehingga para pedagang merasa terbebani dengan jumlah yang cukup besar dan dianggap tidak sesuai dengan luas area yang disediakan. Koordinasi antara pedagang dengan panitia pelaksanaan juga kadang kurang jelas yang membuat kebingungan saat hari pelaksanaan." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 16:40 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu hambatan yang dirasakan oleh para pedagang yaitu biaya untuk area pedagang yang begitu mahal yang membuat para pedagang menjadi keberatan.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

"Bagi saya akses untuk menuju arena pacu jalur masih sulit. Dikarenakan bahu jalan sudah dijadikan tempat parker mobil yang membuat kemacetan. Serta kurangnya lahan parkir yang berada dekat arena pacu jalur. Sehingga ada yang

harus berjalan kaki cukup jauh untuk ke arena pacu jalur. Kemudian, para wisatawan juga kesulitan mencari penginapan. Karena penginapan di Kuantan Singingi ini masih sangat minim." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 14:45 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dirasakan oleh pengunjung yaitu sulitnya akses menuju arena pacu jalur. Serta kurangnya lahan parkir untuk mobil. Wisatawan juga mengeluhkan sulitnya mencari penginapan. Bahkan ada beberapa yang terpaksa menginap di Masjid terdekat.

Wendra Zulva Hendri menyatakan:

"Dari yang saya lihat, salah satu hambatan yang masih terjadi adalah kurangnya pelatihan atau pembekalan bagi relawan dan panitia lokal. Kadang saat acara berlangsung, masih terlihat kekacauan teknis atau ketidaksiapan dalam menangani keramaian pengunjung. Hal ini membuat pengalaman penonton jadi kurang nyaman dan bisa mengurangi minat orang untuk datang lagi." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 17:45 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pacu Jalur adalah minimnya pelatihan atau kesiapan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam acara. Kurangnya pelatihan teknis menyebabkan koordinasi di lapangan tidak berjalan optimal, sehingga memengaruhi kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan budaya. Dinas perlu meningkatkan pembinaan dan manajemen SDM lokal agar pelaksanaan festival lebih profesional dan tertata.

4. Pemerataan

Dalam pelestarian dan pengembangan budaya Pacu Jalur, pemerataan pandangan, nilai, serta tujuan antara berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat,

maupun pelaku budaya memegang peranan penting. Pemerataan ini mencerminkan sejauh mana budaya Pacu Jalur dipahami, dihargai, dan dijadikan identitas bersama oleh seluruh elemen yang terlibat. Melalui indikator ini, peneliti mengkaji tingkat pemerataan persepsi dan komitmen antar pihak terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan tradisi Pacu Jalur sebagai warisan budaya lokal.

a. Biaya Yang Didistribusikan

Dalam kerangka evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Pacu Jalur, distribusi biaya sangat penting. Ini menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat dan proporsional kepada berbagai komponen mulai dari penyediaan jalur, honor panitia, perlengkapan teknis, hingga kegiatan promosi dan pemeliharaan infrastruktur. Melalui analisis distribusi biaya, peneliti bertujuan mengevaluasi sejauh mana transparansi, efisiensi, dan keadilan pembiayaan mendukung kelangsungan tradisi Pacu Jalur sebagai warisan budaya lokal. Maka penulis melakukan wawancara bersama Key informan, bahwa:

“Setiap tahun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyiapkan anggaran berdasarkan usulan panitia lokal dan rekomendasi tim teknis. Anggaran dibagi ke dalam beberapa bagian utama, yaitu persiapan jalur, honor panitia dan petugas lapangan, sarana-prasarana pendukung seperti sound system, promosi serta dokumentasi, dan pemeliharaan pasca-acara. Proses penetapan proporsi ini sudah melalui rapat koordinasi berbagai bidang, termasuk keuangan daerah guna memastikan kesesuaian alokasi dengan peraturan daerah dan kebutuhan lapangan”. (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:35 WIB).

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran kegiatan Pacu Jalur oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan secara terstruktur dan melalui koordinasi lintas bidang. Anggaran dibagi ke dalam

beberapa pos penting seperti persiapan jalur, honor panitia, sarana dan prasarana, promosi, serta pemeliharaan pasca-acara. Proses penyusunan dilakukan berdasarkan usulan panitia lokal dan rekomendasi teknis, serta mempertimbangkan peraturan dan kebutuhan di lapangan, sehingga mencerminkan upaya untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Ibu Ovi Arlianti menjelaskan:

"Setiap tahun, anggaran Pacu Jalur kami susun berdasarkan kebutuhan lapangan dan masukan dari panitia pelaksana. Biaya tersebut kemudian didistribusikan ke beberapa komponen utama, seperti pembersihan dan penataan jalur pacu, honor panitia dan petugas teknis, penyediaan sarana prasarana seperti panggung dan sound system, promosi dan publikasi acara, serta dokumentasi kegiatan. Selain itu, sebagian anggaran juga kami alokasikan untuk evaluasi dan pemeliharaan setelah acara selesai. Semua proses ini tentu mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan kebijakan keuangan daerah." (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, Tanggal 25 April 2025, pukul 10:40 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, distribusi anggaran kegiatan budaya Pacu Jalur dilakukan secara sistematis dan merata ke berbagai aspek penting pelaksanaan acara, mulai dari persiapan teknis hingga promosi dan evaluasi. Penyusunan anggaran didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan serta melibatkan panitia pelaksana, dengan tetap mengacu pada ketentuan keuangan daerah guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana.

David Chaniago Menyatakan:

"Kalau saya lihat, dana yang disalurkan pemerintah sudah cukup baik, terutama untuk acara inti seperti lomba Pacu Jalur dan penyediaan panggung utama. Tapi menurut saya, masih perlu transparansi lebih, supaya masyarakat tahu secara rinci dana itu dipakai untuk apa saja." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 16:45 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun distribusi anggaran oleh pemerintah dianggap cukup baik dalam mendukung kegiatan utama Pacu Jalur, masyarakat masih menginginkan adanya transparansi yang lebih jelas terkait penggunaan dana. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

"Secara umum pemerintah sudah membantu banyak, tapi saya rasa dana untuk UMKM atau pedagang kecil kurang terasa. Kami berharap ke depan ada alokasi khusus untuk pelaku usaha lokal agar bisa ikut merasakan dampak ekonomi dari acara ini." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 14:50 WIB).

Dari wawancara di atas, disimpulkan bahwa pemerintah telah berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan Pacu Jalur, tetapi pelaku usaha kecil seperti UMKM masih merasa kurang mendapat perhatian dalam hal alokasi anggaran. Masyarakat berharap ke depannya pemerintah dapat mengalokasikan dana secara lebih merata, termasuk untuk mendukung usaha lokal agar mereka juga memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan acara budaya tersebut.

Wendra Zulva Hendri menyatakan:

"Saya rasa masih ada yang perlu diperbaiki, terutama di bagian fasilitas umum untuk pengunjung. Misalnya tempat parkir, tenda, atau kebersihan. Seharusnya dana juga cukup dialokasikan untuk hal-hal pendukung seperti itu agar acara lebih nyaman bagi semua orang." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 17:50 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih menilai pembagian anggaran kegiatan Pacu Jalur belum sepenuhnya optimal, terutama dalam penyediaan fasilitas umum. Kurangnya perhatian terhadap aspek pendukung seperti area parkir, kebersihan, dan kenyamanan pengunjung menunjukkan perlunya evaluasi dalam perencanaan anggaran agar pelaksanaan acara dapat berlangsung lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi semua kalangan.

b. Akses Yang Setara

Akses yang setara terhadap fasilitas, informasi, dan kesempatan berpartisipasi menjadi kunci dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati dan melestarikan tradisi Pacu Jalur. Sub indikator ini menyoroti seberapa jauh penyediaan infrastruktur perlombaan mulai dari akses jalan menuju tribun, media informasi pendaftaran, hingga program pelatihan panitia dapat dijangkau oleh semua desa peserta tanpa terkecuali. Dengan mengevaluasi aksesibilitas tersebut, peneliti bertujuan mengidentifikasi hambatan yang masih ada serta merumuskan rekomendasi agar setiap komponen masyarakat memiliki peluang yang sama dalam mendukung kelangsungan budaya Pacu Jalur. Berikut merupakan wawancara penulis dengan Key informan:

“Terkait pembagian anggaran saya rasa tidak ada kelompok yang dirugikan. Karena ini sifatnya sebelum kegiatan dimulai kita sudah melakukan diskusi dengan panitia setempat. Semua informasi kita sampaikan, apa saja yang kita berikan atau fasilitasi melalui APBD. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan, saya rasa itu sangat tidak mungkin. Karena ini masalah administrasi, biasanya semua anggaran secara umum dilaukan secara non-tunai. Contohnya uang operasional suatu Jalur. Mereka harus melengkapi dengan nomor rekening serta identitas pihak Jalurnya. Terkadang di situlah yang terjadi hambatan anggaran kepada pihak tertentu.” (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:40 WIB).

Dari wawancara di atas, bahwa pembagian anggaran Pacu Jalur telah dilaksanakan secara adil dan transparan melalui diskusi awal dengan panitia setempat, menggunakan mekanisme non-tunai via APBD. Satu-satunya kendala yang muncul adalah kelengkapan administrasi (rekening dan identitas), yang dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana bagi pihak tertentu.

Ibu Ovi Arlianti menyatakan:

“Ya, kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan akses yang adil kepada seluruh kelompok, baik dari segi fasilitas, informasi, maupun kesempatan berpartisipasi. Setiap jalur, baik dari desa yang besar maupun kecil, diberikan ruang yang sama untuk tampil dan berkontribusi dalam kegiatan. Kami juga membuka pendaftaran secara terbuka dan melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah agar tidak ada yang tertinggal.” (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 10:45 WIB).

Dari hasil wawancara dengan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan akses yang setara kepada setiap kelompok masyarakat dalam kegiatan budaya Pacu Jalur. Upaya ini dilakukan melalui pemerataan fasilitas, penyebaran informasi, serta sistem pendaftaran yang terbuka dan transparan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan, seperti keterbatasan anggaran dan akses wilayah,

pemerintah terus berusaha memastikan semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

David Chaniago menyatakan:

"Saya lihat, pemerintah sudah berusaha cukup baik dalam memberikan kesempatan yang sama. Tapi dalam praktiknya, masih ada desa kecil yang merasa kurang terfasilitasi, terutama soal transportasi dan perlengkapan jalur." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 16:50 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya memberikan akses yang setara kepada seluruh kelompok masyarakat dalam kegiatan Pacu Jalur, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketimpangan. Beberapa desa kecil masih merasa kurang mendapatkan fasilitas yang memadai, terutama dalam hal transportasi dan perlengkapan jalur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan akses perlu terus ditingkatkan agar semua kelompok benar-benar merasakan keadilan dalam partisipasi.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

"Menurut saya aksesnya sudah cukup merata, apalagi sekarang semua bisa ikut berjualan atau membuka stand saat acara berlangsung. Tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya, agar semua pelaku usaha tahu bagaimana cara ikut serta." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 14:55 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa akses yang diberikan pemerintah dalam kegiatan Pacu Jalur sudah cukup merata, khususnya bagi para pelaku usaha yang ingin berpartisipasi. Namun, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi agar seluruh pelaku UMKM, termasuk yang

belum memiliki informasi, dapat ikut serta secara maksimal. Dengan begitu, kesetaraan akses dapat terwujud secara lebih menyeluruh.

Wendra Zulva Hendri menyatakan:

"Cukup setara, tapi kadang ada kelompok pemuda yang merasa belum diberi peran besar. Harusnya kegiatan pendukung seperti lomba atau pelatihan lebih digiatkan lagi untuk kami." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 17:55 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun akses yang diberikan pemerintah dalam kegiatan Pacu Jalur sudah cukup setara, masih terdapat kelompok tertentu seperti pemuda yang merasa belum mendapatkan peran optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterlibatan pemuda melalui kegiatan pendukung seperti lomba, pelatihan, atau program kreativitas agar kesetaraan akses benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Responsivitas

Responsivitas mengukur seberapa cepat dan tepat tanggapan penyelenggara serta pemangku kepentingan terhadap berbagai kebutuhan, masukan, dan perubahan kondisi selama proses penyelenggaraan Pacu Jalur. Peneliti menilai kemampuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, panitia lokal, dan pihak terkait lainnya dalam merespons tantangan seperti kendala teknis lapangan, permintaan peserta, hingga kondisi cuaca serta efektivitas komunikasi dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pelaku budaya. Hasil analisis responsivitas diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan mendukung kelancaran dan keberlanjutan tradisi Pacu Jalur.

a. Kepuasan Hasil Pelaksanaan

Kepuasan hasil pelaksanaan Pacu Jalur menggambarkan sejauh mana harapan dan kebutuhan peserta, penonton, serta pemangku kepentingan terpenuhi selama dan setelah acara berlangsung. Ini menilai persepsi positif atas aspek teknis lomba, kenyamanan penonton, kejelasan informasi, serta dampak ekonomi dan budaya yang dirasakan masyarakat. Dengan mengukur tingkat kepuasan berbagai pihak, peneliti dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Pacu Jalur, sehingga rekomendasi perbaikan dapat difokuskan pada aspek yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan keberlanjutan tradisi. Jadi penulis melakukan wawancara dengan masyarakat setempat yaitu bersama Key informan:

"kami merasa cukup puas dengan hasil pelaksanaan Pacu Jalur setiap tahunnya. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, baik dari peserta, penonton lokal, maupun wisatawan luar daerah. Selain itu, dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan sektor pariwisata juga terlihat meningkat selama kegiatan berlangsung." (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:45 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan budaya Pacu Jalur tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dan wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya, serta dampak positif terhadap pelaku UMKM dan sektor pariwisata daerah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Pacu Jalur tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal.

Ibu Ovi Arlianti menyatakan:

"Dari tahun ke tahun, kami melihat peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi partisipasi masyarakat, kunjungan wisatawan, maupun dampak ekonomi lokal. Kami cukup puas karena kegiatan ini mampu memperkuat identitas budaya daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat." (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, Tanggal 25 April 2025, pukul 10:50 WIB).

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan budaya Pacu Jalur dinilai cukup memuaskan. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat, tingginya jumlah kunjungan wisatawan, serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga lokal. Selain sebagai ajang pelestarian budaya, kegiatan ini juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan identitas daerah secara berkelanjutan.

David Chaniago menyatakan:

"Saya cukup puas, acaranya berjalan lancar dan meriah. Banyak pengunjung dari luar daerah yang datang, itu membanggakan. Tapi menurut saya masih perlu ditambah petugas kebersihan, karena sampah agak banyak setelah acara." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 16:55 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ia merasa puas dengan pelaksanaan kegiatan budaya Pacu Jalur. Acara dinilai berjalan lancar dan mampu menarik perhatian masyarakat luas, termasuk pengunjung dari luar daerah. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal pengelolaan kebersihan, sehingga ke depan diharapkan adanya peningkatan jumlah petugas kebersihan agar kenyamanan lingkungan tetap terjaga selama dan setelah acara berlangsung.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

"Saya sangat senang. Penjualan meningkat drastis selama acara. Banyak orang mampir beli dagangan kami. Kegiatannya juga tertib dan ramai. Kalau bisa, tahun depan ditambah lagi hari pelaksanaannya biar lebih lama." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 15:00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa acara tersebut memberikan dampak positif terhadap pendapatan pelaku UMKM karena meningkatnya jumlah pengunjung. Selain itu, pelaksanaan yang tertib dan ramai juga menambah nilai positif acara. Ia berharap durasi kegiatan bisa diperpanjang di tahun berikutnya agar manfaat ekonomi dan hiburan yang dirasakan masyarakat semakin besar.

Wendra Zulfa Hendri menyatakan:

"Saya merasa puas dengan peningkatan fasilitas tribun dan pos kesehatan ditahun ini. Petugas keamanan juga lebih terkoordinasi. Yang masih perlu diperbaiki, penerangan malam hari di kawasan parkir agak sedikit gelap, sering saya lihat pengunjung kesulitan mencari kendaraan sesudah acara. Kuota lapak juga lebih banyak dan tarifnya lebih terjangkau. Pemerintah juga menyediakan promosi melalui media sosial dinas, jadi pengunjung lebih banyak yang mampir belanja. Meski masih ada beberapa tetangga yang berharap penataan lapak lebih rapi, secara umum kami merasakan peningkatan pendapatan". (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 18:00 WIB).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, masyarakat setempat merasa puas dengan peningkatan fasilitas seperti tribun, pos kesehatan, dan koordinasi petugas keamanan. Selain itu, jumlah dan tarif lapak dinilai lebih baik serta promosi melalui media sosial membantu meningkatkan pengunjung dan pendapatan. Namun, masih terdapat kekurangan seperti penerangan yang kurang di area parkir dan penataan lapak yang perlu diperbaiki.

b. Kebutuhan Masyarakat

Kebutuhan masyarakat mencakup harapan dan keperluan warga lokal dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pacu Jalur, mulai dari akses informasi, fasilitas penonton, hingga peluang ekonomi. Sub indikator ini bertujuan mengidentifikasi apa saja yang paling dibutuhkan oleh berbagai kelompok seperti pedagang, panitia desa, peserta lomba, dan pengunjung agar pelaksanaan Pacu Jalur dapat memberikan manfaat optimal. Dengan memahami kebutuhan riil masyarakat, peneliti diharapkan mampu merumuskan rekomendasi supaya tradisi Pacu Jalur tidak hanya lestari, tetapi juga relevan dan memberdayakan komunitas setempat.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Key informan:

“kami berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari sisi hiburan, ekonomi, maupun fasilitas umum. Kami sediakan ruang bagi UMKM, tempat hiburan rakyat, serta memperbaiki sarana seperti toilet umum, tenda, dan area parkir.” (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:50 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan budaya Pacu Jalur. Hal ini tercermin dari penyediaan berbagai fasilitas umum seperti toilet, tenda, dan area parkir, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat melalui ruang bagi pelaku UMKM. Upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek hiburan, ekonomi, dan kenyamanan masyarakat selama berlangsungnya acara.

Ibu Ovi Arlianti menyatakan:

"Kami selalu berupaya menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dengan menyediakan ruang usaha bagi pedagang lokal, area tontonan yang nyaman, fasilitas umum seperti toilet dan tempat duduk, serta pengamanan selama acara berlangsung. Kami juga menerima banyak masukan agar setiap tahun penyelenggaraan bisa lebih baik." (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, Tanggal 25 April 2025, pukul 10:55 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan budaya Pacu Jalur dengan menyediakan fasilitas umum, ruang usaha, dan area tontonan yang nyaman. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, pemerintah daerah terbuka terhadap masukan masyarakat dan terus berupaya melakukan perbaikan setiap tahunnya agar pelaksanaan kegiatan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga.

David Chaniago menyatakan:

"Sebagian besar sudah, terutama soal hiburan dan tempat jualan. Tapi untuk fasilitas seperti tempat duduk dan toilet umum, saya rasa masih kurang, apalagi kalau pengunjung sedang ramai." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 17:00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kebutuhan masyarakat dalam kegiatan Pacu Jalur telah terpenuhi, khususnya dalam hal hiburan dan peluang usaha bagi warga. Namun, masih terdapat kekurangan pada fasilitas pendukung seperti tempat duduk dan toilet umum, terutama saat jumlah pengunjung membludak. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan jumlah fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan peserta dan penonton.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

“Fasilitas tribun penonton cukup nyaman untuk para penonton. Untuk toilet jumlahnya sudah banyak dan kebersihannya sudah terjaga hanya aja antreannya sangat panjang pada saat jeda perlombaan. Kemudian area parkir sebaiknya ditambahkan lampu penerang karena terkadang acara selesai sampai waktu maghrib”. (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 15:05 WIB).

Dari wawancara di atas dapat diartikan bahwa, masyarakat menilai fasilitas tribun dan toilet sudah memadai dan terjaga kebersihannya, namun antrean masih menjadi kendala saat jeda perlombaan. Selain itu, penerangan di area parkir perlu ditingkatkan karena acara sering berlangsung hingga menjelang malam.

Wendra Zulva Hendri menyatakan:

"Saya rasa sebagian besar kebutuhan masyarakat sudah cukup terpenuhi, terutama untuk hiburan dan kuliner. Tapi menurut saya, akses jalan dan pengaturan lalu lintas masih kurang tertata. Kadang macet dan sulit cari parkir, apalagi kalau datang di jam ramai. Ke depan, semoga bisa lebih tertib agar pengunjung lebih nyaman." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 18:05 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pacu Jalur telah berhasil memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat, terutama dalam aspek hiburan dan kuliner. Namun, ia menyoroti masih kurangnya penataan akses jalan dan lalu lintas, yang menyebabkan kemacetan dan kesulitan parkir saat acara berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam manajemen transportasi dan area parkir agar kenyamanan pengunjung semakin meningkat di masa mendatang.

6. Ketepatan

Ketepatan mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan Pacu Jalur sesuai dengan rencana waktu, tahap lomba, dan alokasi sumber daya yang telah ditetapkan. Indikator ini menyoroti kemampuan panitia dan pemangku kebijakan dalam memenuhi tenggat persiapan jalur, jadwal latihan peserta, hingga durasi acara tanpa terjadi keterlambatan yang merugikan. Dengan menganalisis tingkat ketepatan pelaksanaan, peneliti dapat menilai efektivitas perencanaan dan koordinasi guna mendukung kelancaran dan profesionalisme tradisi Pacu Jalur.

a. Kegunaan dan Nilai Tujuan

Ini menilai sejauh mana penyelenggaraan Pacu Jalur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang diharapkan. Indikator ini mengkaji bagaimana setiap kegiatan mulai dari persiapan jalur hingga upacara penutupan dirancang untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi, pelestarian tradisi, dan peningkatan rasa kebersamaan antarwarga. Dengan mengevaluasi kegunaan praktis serta kebermaknaan tujuan tersebut, peneliti dapat menilai kontribusi Pacu Jalur dalam memperkuat identitas komunitas dan mendukung pertumbuhan sosial-ekonomi daerah. Berikut hasil wawancara penulis dengan Key informan:

"Tentu sangat berguna dan bernilai. Pacu Jalur bukan hanya ajang perlombaan, tapi juga wadah pelestarian budaya lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Selain itu, kegiatan ini berdampak langsung pada sektor ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan pariwisata. Pacu Jalur juga membangun rasa kebersamaan dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya daerah mereka." (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, Tanggal 25 April 2025, pukul 09:55 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan budaya Pacu Jalur memiliki manfaat yang nyata dan nilai yang tinggi bagi masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya warisan leluhur, kegiatan ini juga memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial. Pacu Jalur memperkuat rasa kebersamaan, membangkitkan kebanggaan terhadap identitas daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan pariwisata lokal.

Ibu Ovi Arlianti menyatakan:

“Pacu Jalur ini sudah masuk ke dalam warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh negara. Bahkan dari Tahun 2022-2024 Pacu Jalur Ini masuk Karisma Event Nusantara (KEN). Serta pada Tahun 2024 kemarin Pacu Jalur merupakan salah satu event terbaik secara nasional. Ini merupakan sebuah penghargaan dari pemerintah terhadap pelaksanaan event daerah. Karena Pacu Jalur ini bukan hanya sekedar berpacu tapi memiliki keunikan yang tidak ada di daerah lain. Jadi tujuan dari Pelaksanaan Pacu Jalur ini sangat berguna dan bernilai untuk melesatarikan budaya Kuantan Singingi”. (Hasil wawancara pada Hari Jumat, Tanggal 25 April 2025, pukul 11:00 WIB).

Dasil wawancara di atas, dapat disimpulkan Pacu Jalur telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dan menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN) selama 2022–2024, bahkan meraih predikat sebagai salah satu event terbaik nasional pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pacu Jalur memiliki nilai budaya tinggi dan keunikan khas daerah, serta berperan penting dalam pelestarian budaya Kuantan Singingi.

David Chaniago menyatakan:

"Tentu sangat berguna. Pacu Jalur ini bukan hanya perlombaan, tapi simbol kebersamaan masyarakat kita sejak dulu. Anak-anak muda jadi tahu sejarah dan

makna budaya kita, dan itu sangat penting untuk dijaga." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 17:05 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya Pacu Jalur memiliki makna yang sangat berguna dan bernilai, tidak hanya sebagai ajang perlombaan, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan masyarakat. Kegiatan ini turut berperan dalam pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, sehingga menjadi sarana penting untuk menjaga dan melestarikan identitas budaya lokal.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

"Manfaatnya terasa sekali, terutama bagi pedagang. Selain itu, ini jadi hiburan tahunan yang dinanti-nanti warga. Anak-anak juga jadi lebih mengenal budaya kampung sendiri daripada hanya main handphone." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 15:10 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pacu Jalur memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi pedagang lokal, tetapi juga menjadi hiburan rakyat yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Selain itu, Pacu Jalur berperan penting dalam mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak sejak dini, sehingga turut mendukung pelestarian budaya di tengah perkembangan teknologi.

Wendra Zulva Hendri menyatakan:

"Ya, sangat bermanfaat. Selain memperkuat identitas daerah, acara ini juga mendorong partisipasi pemuda. Banyak teman saya yang terlibat sebagai panitia atau pengisi acara, jadi kami merasa punya peran nyata dalam

melestarikan budaya." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 18:10 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pacu Jalur memberikan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Selain memperkuat identitas dan kebanggaan terhadap daerah, kegiatan ini juga membuka ruang partisipasi aktif bagi pemuda dalam pelestarian budaya. Keterlibatan mereka sebagai panitia atau pengisi acara menciptakan rasa memiliki dan memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya secara kolektif.

b. Kesesuaian Solusi

Mengkaji efektivitas solusi mulai dari fasilitas, penyiapan sarana evakuasi saat cuaca ekstrem, hingga kebijakan subsidi bagi UMKM lokal dalam mengatasi hambatan teknis, administratif, dan sosial. Dengan mengevaluasi kesesuaian solusi, peneliti dapat mengetahui apakah strategi penanganan tersebut benar-benar tepat guna dan mampu mendukung kelancaran serta keberlanjutan tradisi Pacu Jalur. Jadi penulis melakukan wawancara dengan Key informan:

"Kami terus berupaya menyelesaikan berbagai kendala yang muncul dalam setiap pelaksanaan Pacu Jalur. Sejauh ini, solusi yang diterapkan cukup efektif, walaupun masih ada yang belum maksimal seperti penambahan fasilitas umum, penataan area pengujung, dan koordinasi lintas instansi untuk keamanan dan lalu lintas. Evaluasi rutin selalu kami lakukan agar pelaksanaan berikutnya bisa lebih baik." (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, Tanggal 25 April 2025, pukul 10:00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa solusi yang diterapkan dalam mengatasi masalah pada kegiatan budaya Pacu Jalur sebagian

besar sudah berjalan sesuai harapan. Meskipun belum sepenuhnya maksimal, langkah-langkah seperti penambahan fasilitas umum, penataan area pengunjung, serta koordinasi lintas instansi telah memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan acara. Evaluasi rutin yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan di masa mendatang.

Ibu Ovi Arlianti menyatakan:

“Kami masih berupaya semaksimal mungkin dengan kendala-kendala yang ada melalui pemerintah maupun pihak swasta. Hal utama yang perlu dibenahi yaitu di sekitar gelanggang atau arena Pacu Jalur itu sendiri. Yaitu ada wilayah pribadi yang belum terkelola dengan baik seperti tribun dan lain-lain. Sebenarnya dari pemerintah sendiri kita sudah siap. Namun dampak yang besar dari event ini seperti pengunjung yang padat jadi penyebab hambatan berbagai hal. Jadi kami masih berupaya ekstra untuk membenahi masalah yang ada. Dan barangkali kami akan membangun tribun yang dibangun oleh pemerintah”. (Hasil wawancara pada Hari Jum’at, Tanggal 25 April 2025, pukul 11:05 WIB).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Penanggung jawab menyampaikan bahwa meski pemerintah dan pihak swasta telah menyiapkan dukungan, masih terdapat kendala pengelolaan fasilitas di arena terutama tribun akibat lonjakan pengunjung. Upaya ekstra sedang dilakukan untuk memperbaiki area tersebut, termasuk rencana pembangunan tribun baru oleh pemerintah guna mengatasi hambatan dan meningkatkan kapasitas serta kenyamanan penonton.

David Chaniago menyatakan:

"Beberapa solusi sudah baik, seperti penambahan tenda dan panggung untuk penonton. Tapi soal parkir dan kemacetan, saya rasa belum maksimal. Harusnya ada petugas khusus untuk mengatur arus kendaraan." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 17:10 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian solusi yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan Pacu Jalur sudah sesuai dengan harapan masyarakat, seperti penambahan tenda dan fasilitas untuk penonton. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal pengaturan lalu lintas dan area parkir, yang dinilai belum tertangani secara optimal. Diperlukan peningkatan pengelolaan mobilitas pengunjung melalui penempatan petugas khusus agar kenyamanan dan kelancaran acara dapat lebih terjamin.

Trinandi Kurnia Akbar menyatakan:

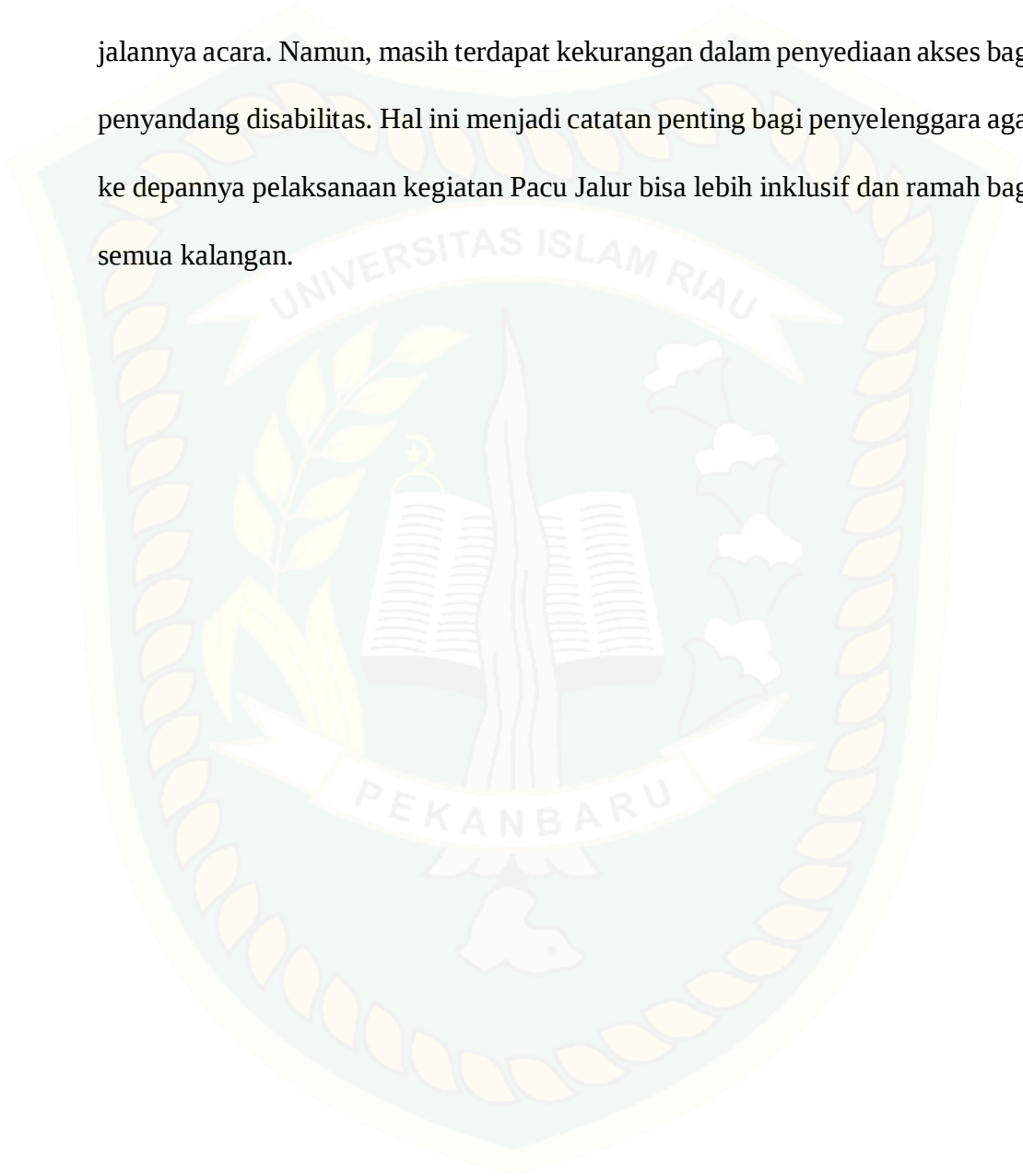
"Saya lihat ada perbaikan, terutama di penataan lokasi jualan. Sekarang kami tidak terlalu berdesakan seperti dulu. Tapi tempat sampah masih minim sehingga banyak sampah berserakan setelah acara." (Hasil wawancara pada Hari Sabtu, Tanggal 26 April 2025, pukul 15:15 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penataan lokasi jualan pada kegiatan Pacu Jalur sudah menunjukkan perbaikan dan memberikan dampak positif bagi pedagang. Namun, masalah kebersihan masih menjadi perhatian, khususnya minimnya fasilitas tempat sampah yang menyebabkan sampah berserakan setelah acara. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap aspek kebersihan agar lingkungan tetap nyaman bagi pengunjung dan pedagang.

Wendra Zulva Hendri menyatakan:

"Sudah ada peningkatan, misalnya soal informasi jadwal yang lebih jelas lewat media sosial. Tapi untuk akses bagi penyandang disabilitas saya rasa belum terlalu diperhatikan. Itu juga penting untuk jadi perhatian ke depan." (Hasil wawancara pada Hari Minggu, Tanggal 27 April 2025, pukul 18:15 WIB).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa solusi yang diterapkan, seperti penyampaian informasi melalui media sosial, sudah menunjukkan kemajuan dan mempermudah pengunjung dalam mengikuti jalannya acara. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penyediaan akses bagi penyandang disabilitas. Hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara agar ke depannya pelaksanaan kegiatan Pacu Jalur bisa lebih inklusif dan ramah bagi semua kalangan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pacu Jalur mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda dan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Program ini memperkuat citra daerah di tingkat nasional hingga internasional serta berperan dalam pewarisan nilai budaya melalui keterlibatan sekolah dan komunitas. Anggaran dan sumber daya telah dikelola dengan cukup baik. Pemerintah terus melakukan upaya seperti penyelenggaraan festival, pembinaan generasi muda, promosi digital, dan dukungan anggaran untuk tim jalur di desa.
2. Sumber daya yang tersedia sebagian besar sudah mendukung pelaksanaan Pacu Jalur, dengan beberapa kekurangan seperti keterbatasan fasilitas yang masih perlu ditingkatkan. Pemerintah berupaya membenahi masalah yang ada di sekitaran arena Pacu Jalur yang menjadi penghambat kegiatan berlangsung. Pemerintah berencana membangun tribun dari pemerintah sendiri untuk memudahkan para wisatawan yang kadang terkendala masalah harga dari tribun milik pribadi.

B. Saran

Terkait hambatan yang ditemukan peneliti dalam Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam

Melaksanakan Budaya Pacu Jalur, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan masukan, yaitu:

1. Pemerintah daerah sebaiknya segera merealisasikan pembangunan tribun milik pemerintah agar akses menonton Pacu Jalur menjadi lebih terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat dan wisatawan. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan terhadap tribun milik pribadi yang kerap menjadi hambatan karena harga yang tinggi.
2. Disarankan agar pemerintah mempercepat perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung seperti toilet umum, area parkir, penerangan, dan akses jalan menuju arena. Fasilitas ini akan sangat membantu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung selama kegiatan berlangsung.
3. Pemerintah dapat menyediakan program pelatihan dan pendampingan rutin bagi pelaku UMKM lokal agar mereka tidak hanya mendapat keuntungan saat acara, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan pasca kegiatan.
4. Untuk menutupi keterbatasan anggaran dan percepatan pembangunan, kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat perlu diperluas, misalnya dalam bentuk sponsor kegiatan, CSR atau komitmen untuk pembangunan fasilitas umum, atau pelibatan komunitas lokal dalam manajemen acara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chandra, Erbin dan Enita Rosmikad kk. 2021. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gesmi, Irwan dan Eliwon Feriyanus. 2018. *Birokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Pekanbaru: Myria Publisher.
- Haudi. 2021. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Tangerang: Insan Cendekia Mandiri.
- Irawan dan Farida Idayati dkk. 2024. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berkelanjutan*. Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Labolo, Muhadam dan Hyronimus Rowasiu dkk. 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Palembang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Prasetyo, Eko dan Fitria Agustina dkk. 2003. *Ombudsman Daerah Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rahardjo, Daniel Adi Setya. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rahman, Aulia Arief dan Cut Eva Nasryah. 2019. *Evaluasi Pembelajaran*. Meulaboh: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rahman, Khairul. 2022. *Ilmu Pemerintahan & Tinjauan Dari Landasan Berfikir Filsafat Ilmu*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru: Rajawali Pers.
- Sembiring, Tamaulina Br dan Asri Ady Bakari dkk. 2023. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Solok: MAFY Media Literasi Indonesia.
- Sutjiatmi, Sri. 2010. *Filsafat Pemerintahan*. Tegal: Badan Penerbitan Universitas Pancasakti Tegal.
- Suwardi. 2007. *Bahan Ajar Kebudayaan Melayu*. Pekanbaru: Kampus Akademi Pariwisata Engku Puteri Hamidah.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Thahir, Baharuddin. 2019. *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Buku Literatur IPDN.
- Ulfa dan Rizka Amelia Armin. 2024. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Palopo: CV. Eureka Media Aksara.
- Wijaya dan Emiliana Sri Pudjiarti dkk. 2018. *Buku Ajar Good Governance*. Semarang: Pustaka Magister.
- Wijaya, Mendra dan Rusli Isa dkk. 2024. *Ilmu Pemerintahan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Yuliani, Irma. 2023. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Samarinda: PT RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

- Adrie. 2022. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)* Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian.
- Padang, Bonita & Dwi, Fito & Ramadhan, Rezky & Januardi, & Ramadhani, Monica & Endah, Patricia & Saputra, S & Octariantoni, Rosi & Romdania, Sri & Febiola, Winda & Dewi, Shinta & Suroyo, Suroyo. (2022). *Pacu Jalur Dan Kekeluargaan Masyarakat Desa Pulau Kalimantan*. J-Abdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. 2. 4781–4794. 10.53625/jabdi.v2i5.3522
- Rendi, M. Aridhayandi 2018. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang baik (Good Governance) di Bidang Pemerintahan Yang*

Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografi. Cianjur: Faculty Of Law Universitas Surya Kencana.

Saputri, Ekawati dan Syarifah Khairani. 2021. *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Minat Baca Melalui Pojok Baca Digital (POCADI) di Kota Lhokseumawe, Aceh.* Aceh: Universitas Malikusaleh.



DAFTAR & KUTIPAN WAWANCARA

Indikator	Sub Indikator	Informan	Kutipan Wawancara
Efektivitas	Hasil Kegiatan Budaya Pacu Jalur	Masyarakat atau penonton	<i>Warga merasa bangga karena Pacu Jalur mampu menjaga dan memperkenalkan budaya khas Kuantan Singingi kepada generasi muda serta pengunjung dari luar daerah. Banyak pedagang lokal yang merasa ada peningkatan pendapatan selama pelaksanaan acara. Kegiatan ini juga membuka peluang usaha di sector UMKM, kuliner, dan cinderamata.</i>
	Dampak Dari Kebijakan	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi	<i>Secara umum, pelaksanaan Pacu Jalur memberikan dampak yang sangat positif bagi Kabupaten Kuantan Singingi, baik dari segi pelestarian budaya, sosial kemasyarakatan, maupun sektor ekonomi. Kami selalu mendorong partisipasi sekolah-sekolah dan komunitas pemuda agar ikut terlibat dalam proses pelestariannya.</i>
Efisiensi	Usaha Yang Dilakukan	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi	<i>Pertama, kami secara rutin menyelenggarakan Festival Pacu Jalur setiap tahunnya, baik di tingkat rayon maupun tingkat nasional. Kedua, kami juga melakukan pembinaan kepada generasi muda melalui sekolah-sekolah, sanggar budaya, dan pelatihan yang melibatkan tokoh-tokoh adat serta masyarakat pelestari budaya.</i>

	Penggunaan Anggaran	Kepala Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi	<i>Dalam konteks kegiatan Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, alokasi dan pemanfaatan dana yang tepat sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan acara, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Ini bertujuan untuk melihat sejauh mana anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Pacu Jalur.</i>
Kecukupan	Pencapaian Usaha	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi	<i>Alhamdulillah, kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, usaha yang kami lakukan dalam pelestarian Pacu Jalur telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Salah satu pencapaian besar adalah diakuinya Pacu Jalur sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</i>
	Kekurangan dan Hambatan	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi	<i>Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran. Meskipun kegiatan ini rutin masuk dalam kalender tahunan, namun kebutuhan dana yang cukup besar sering kali tidak sepenuhnya bisa terpenuhi, terutama untuk pembinaan jalur di tingkat desa dan peningkatan kualitas acara.</i>

Pemerataan	Biaya Yang Didistribusikan	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi	Anggaran dibagi ke dalam beberapa bagian utama, yaitu persiapan jalur, honor panitia dan petugas lapangan, sarana-prasarana pendukung seperti sound system, promosi serta dokumentasi, dan pemeliharaan pasca-acara.
	Akses Yang Setara	Sekretaris Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi	Terkait pembagian anggaran saya rasa tidak ada kelompok yang dirugikan. Karena ini sifatnya sebelum kegiatan dimulai kita sudah melakukan diskusi dengan panitia setempat. Semua informasi kita sampaikan, apa saja yang kita berikan atau fasilitasi melalui APBD.
Responsivitas	Kepuasan Hasil Kegiatan	Masyarakat atau Penonton	Saya merasa puas dengan peningkatan fasilitas tribun dan pos kesehatan ditahun ini. Petugas keamanan juga lebih terkoordinasi. Yang masih perlu diperbaiki, penerangan malam hari di kawasan parkir agak sedikit gelap, sering saya lihat pengunjung kesulitan mencari kendaraan sesudah acara.
	Kebutuhan Masyarakat	Masyarakat atau Penonton	Fasilitas tribun penonton cukup nyaman untuk para penonton. Untuk toilet jumlahnya sudah banyak dan kebersihannya sudah terjaga hanya aja antreannya sangat panjang pada saat jeda perlombaan. Kemudian area parkir sebaiknya ditambahkan lampu penerang karena terkadang acara selesai sampai waktu maghrib

Ketepatan	Kegunaan dan Nilai Tujuan	Ketua Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi	<i>Pacu Jalur ini sudah masuk ke dalam warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh negara. Bahkan dari Tahun 2022-2024 Pacu Jalur Ini masuk Karisma Event Nusantara (KEN).</i>
	Kesesuaian Solusi	Ketua Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuantan Singingi	<i>Kami masih berupaya semaksimal mungkin dengan kendala-kendala yang ada melalui pemerintah maupun pihak swasta. Hal utama yang perlu dibenahi yaitu di sekitar gelanggang atau arena Pacu Jalur itu sendiri.</i>

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi bersama Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Ahmad Herry GN., S.Pi. M.Si sebagai key informan.



Dokumentasi dengan Kepala Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kuantan Singingi Ibuk Ovi Arlianti S.STP



Dokumentasi dengan masyarakat/atlet Pacu Jalur Kuantan Singingi saudara David Chaniago



Dokumentasi dengan masyarakat/penonton Pacu Jalur Kuantan Singingi saudara Wendra Zulva Hendri.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.soc.uir.ac.id

SURAT RISET

Nomor: 169 /E-UIR/27-FISIPOL/2026

Kepada Yth : Bapak / Ibu Pimpinan / Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi
Hal : Mohon Rekomendasi Riset
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat bersama ini datang menghadap Bapak / Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama:

Nama : Ronal Yowanda Pratama
NIM : 207310392
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Semester : Dua Belas (XII)
Alamat : Jl. Melati III, Pekanbaru

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulis Skripsi) dengan judul:

"EVALUASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MELAKSANAKAN BUDAYA PACU JALUR"

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Februari 2026

An. Dekan



Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan 1



Teluk Kuantan, 24 Juni 2023

Nomor : 556/DKP/2023/216
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Perihal : Konfirmasi Mahasiswa/i Magang

Kepada :
Yth.Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fisipol Universitas Islam Riau

di –
Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor :610/IP/FS-UIR/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, perihal Permohonan Kesediaan Menerima Mahasiswa Magang sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya kami menerima dan menyambut baik kedatangan Mahasiswa/i dari Fakultas Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau sebagaimana nama terlampir untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKN) di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana Permohonan Saudara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi tidak menyediakan fasilitas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku di Dinas Kebudayaan Dan pariwisata terutama yang menyangkut disiplin kerja, masuk dan pulang kantor.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Drs. AZHAR, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19680604 199203 1 005



KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 661 / UIR-FS/ KPTS/ 2025

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
Menetapkan
- a. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu fasilitatori oleh Dosen Pembimbing;
 - b. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.
 - 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 6. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 Tentang Statuta Universitas Islam Riau;
 - 8. SK Rektor No. 344/UIR/Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
 - 9. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
 - Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

- KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama	: Septa Juliana, S.Sos., M.Si
NIP/NPK	: 1029098301
Pangkat/Jabatan	: - Asisten Ahli
Kedudukan	: Pembimbing

2. Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: Ronal Yowanda Pratama
NPM	: 207310392
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: EVALUASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MELAKSANAKAN BUDAYA PACU JALUR

- 3. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.
- 4. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
- 5. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal 14 Juli 2025 s/d 14 Januari 2026, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal 14 Juli 2025 M
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

- Tembusan :
- 1. Rektor UIR
 - 2. Ka. Biro Keuangan UIR
 - 3. Wakil Dekan 1 FISIPOL UIR
 - 4. Ketua Prodi Fisipol UIR



Nomor : 48/LAB-IP/JMP/XII/2025
Lampiran : -
Hal : Letter of Acceptance (LoA)

Kepada Yth.

Ronal Yowanda Pratama, Septa Juliana

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan artikel Bapak/Ibu yang sedang diajukan ke redaksi Jurnal JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan dengan judul:

"Evaluasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur"

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel Bapak/Ibu **DITERIMA** dan akan diterbitkan dalam Jurnal JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan pada **Volume 3 Nomor 1, Januari 2026**.

Demikian surat keterangan LoA ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pekanbaru, 09 Desember 2025

Editor in Chief JMP



Jurnal
Mahasiswa
Pemerintahan

Dr. Syaprianto, S.Sos, MIP



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : / 00 / A-UIR/5-FISIPOL/2025

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : RONAL YOWANDA PRATAMA
NPM : 207310392
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur
Persentase Plagiasi : 20%
Jumlah Halaman : 97
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuatdi : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Andriyus. S.Sos., M.Si

Turnitin Hasil Turnitin

RONAL_YOWANDA_PRATAMA_207310392_REVISI KE-2

Raihan, Taufik, Fathur, Ronal

Document Details

Submission ID	
trn:old::3618:115129031	106 Pages
Submission Date	
Oct 1, 2025, 3:03 PM GMT+7	18,307 Words
Download Date	
Oct 1, 2025, 3:19 PM GMT+7	123,804 Characters
File Name	
RONAL_YOWANDA_PRATAMA_207310392_REVISI KE-2.docx	
File Size	
1.8 MB	

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

Submitted works

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 6%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DIREKTORAT DAKWAH ISLAM KAMPUS

الجامعة الإسلامية الريوية

Dengan ini memberikan

SERTIFIKAT

Berdasarkan

Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 11 Tahun 2022

Pasal 2 tentang Kewajiban Bisa Membaca Al-Qur'an bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Islam Riau

Kepada :

RONAL YOWANDA PRATAMA

NPM. 207310392

Lahir di Koto Taluk, Taluk Kuantan, 02 Maret 2001

Pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat **Baik**



Pekanbaru, 05 Juli 2022
Direktur,

Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
NIDN. 1013047704

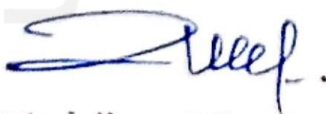
MATRIKS REVISI SKRIPSI

Nama : Ronal Yowanda Pratama
NPM : 207310392
Judul Skripsi : Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melaksanakan Budaya Pacu Jalur

TANGGAL UJIAN : 08 Januari 2026

No	Nama Dosen	Usulan Perbaikan	Keterangan	Paraf
1	Septa Juliana, S.Sos., M.Si	-	-	
2	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si	- Perjelas observasi secara mendalam sesuai kondisi di arena - Profil kehidupan Kuansing	Sudah Diperbaiki	
3	Dr. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si	- Perbaiki abstrak - Perbaiki teori evaluasi - Perkuat hasil Analisa dan observasi	Sudah Diperbaiki	

Pembimbing



Septa Juliana, S.Sos., M.Si

Peneliti



Ronal Yowanda Pratama